STRATEGI KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN

(Studi Kasus di Fakultas Adab dan Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya)

S K R I P S I

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Tarbiyah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K T-2010 033 K1
No REG : T-2010/K1/033
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

A T M A R I
NIM. D03205033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : Atmari

Nim : D03205033

Judul : Strategi Kebijakan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan (Studi Kasus Di Fakultas Adab dan Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 April 2010

Pembimbing,

Drs. H. Masyhudi Ahmad, M.Pd.I
NIP 195606221986031002O

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Atmari ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 27 Mei 2010

Mengesahkan
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dekan,

Dr. Nur Hamim, M. Ag
NIP. 196203121991031002

Ketua,

Drs. Masyhudi Achmad, M. Pd.I
NIP. 195606221986031002O

Sekretaris,

M. Bahri Musthofa, M. Pd. I.
NIP. 197307222005011005

Penguji I,

Drs. Taufiq Subti, M. Ag.
NIP. 195506041983010 15

Penguji II,

Dra. Mukhlisah AM, M.Pd.
NIP. 196805051994032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi Kebijakan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Dalam

Meningkatkan Kualitas Lulusan

(Studi Kasus Di Fakultas Adab dan Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya)

ABSTRAK

Departemen pendidikan Indonesia menelorkan paradigma baru dalam memngembangkan pendidikan tinggi yang sedang terpuruk ini. Timbulnya, Undang-Undang Badan Hukum pendidikan yang memberikan otonomi seutuhnya kepada pengelola pendidikan di tingkat Mikro (lembaga). Otonomi pendidikan ini diharapkan untuk memperluas akses kontribusi perndidikan terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan ini, Lembaga juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan kualitas-kualitas sehingga harapan masyarakat tidaklah pupus di tengah jalan.

Hemat penulis, kebutuhan lembaga berada pada mutu lulusan dari sebuah lembaga. Pasalnya, *out come* tersebut yang akan dijadikan instrument oleh masyarakat untuk menilai keberhasilan suatu Pendidikan Tinggi. Peningkatan mutu di suatu lembaga tidak akan terlaksana tanpa adanya program dan kebijakan yang terus menerus dilaksanakan. Oleh karenanya, peneliti ingin mengangkat tema kebijakan dan mutu lulusan yang ada di IAIN Sunan Ampel, yang secara basis keilmuannya bersinggungan langsung dengan moral masyarakat. Ada dua Fakultas yang diteliti yakni Adab dan Ushuludin, sebagai indikator peningkatan mutu yang sedang dan akan dilaksanakan di IAIN Sunan Ampel.

Metode penelitiannya, menggunakan kualitatif. Hal ini dimaksudkan hanya untuk mengetahui alur pengembangan mutu yang dilaksanakan. bukan suatu implikasi kebijakan yang sudah dilaksanakan sehingga ada dampak antara efektifitas dan efesiensi kebijakan tersebut. Metodenya, melalui wawancara, dan dokumentasi – dokumentasi data yang dimiliki oleh dua lembaga tersebut.

Akhirnya, kami menemukan pelbagai kebijakan peningkatan mutu. dua fakultas tersebut menyadari kekurangan-kekurangan dan diperbaiki melalui kebijakan yang inovatif dan konstruktif, yang dievaluasi setiap semesternya. Oeh karenya, tidak ada memang kebijakan yang berkelangsungan. dalam peningkatan mutu dibutuhkan satu relevansi pada kebutuhan dan kegunannya untuk saat ini dan akan datang. Realitas memang dinamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....

MOTTO ii

PERSEMBAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Definisi Operasional 11

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan 19

B. Proses Pembuatan Kebijakan 23

1. Analisis Permasalahan 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Formulasi 28

3. Forcasting Dampak 29

4. Evaluasi 30

C. Konsep Peningkatan Kualitas / Mutu Pendidikan Islam 35

1. Pengertian Kualitas 37

2. Unsur-Unsur Mutu 41

3. Pelembagaan Mutu Pendidikan Tinggi 57

D. Kebijakan dan Peningkatan Mutu Lulusan di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam 60

1. Problematika dan Karakter Lulusan Pendidikan Tinggi Islam 61

2. Bentuk-bentuk Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam 67

BAB III : PENYAJIAN DATA

A. Profil Lembaga

1. Sekilas Tentang IAIN Sunan Ampel Surabaya 69

2. Sejarah Fakultas Adab dan Ushuludin 72

3. Struktur Kelembagaan Fakultas Adab dan Ushuludin 81

4. Rasio Jumlah Mahasiswa Pertahun 81

5. Dosen dan Staf Administrasi 82

6. Fasilitas Fakultas Adab dan Ushuludin 83

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pembuatan Kebijakan 83

2. Program Peningkatan Mutu Lulusan 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Product Kebijakan Fakultas dalam Peningkatan Lulusan 101

C. Analisis Data

1. Prosedur Pembuatan Kebijakan 104

2. Konsep Peningkatan Mutu Lulusan 106

3. Bentuk-bentuk Kebijakan 110

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 114

B. Saran-saran 115

DAFTAR PUSTAKA 117

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan bangsa. Jumlahnya yang cukup banyak dan sebarannya cukup merata di hampir seluruh wilayah tanah air telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Posisi geografis kebanyakan PTAI bahkan telah memudahkan masyarakat yang tinggal di pedesaan untuk menikmati pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif *"murah"*.

Dilihat dari misinya, letak geografis, dan jumlah yang cukup banyak. Menjadikan PTAI memiliki kesempatatan lebih luas dalam upaya mencerdaskan anggota masyarakat di pedesaan yang dari segi ekonomi dan jarak tempuh tergolong sulit untuk menikmati Pendidikan Tinggi (umum) yang kebanyakan berlokasi di ibu kota propinsi atau perkotaan.

Selain itu, norma dan sistem nilai Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Menjadi nilai *plus* dan menjadi pilihan masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka, yang tidak hanya pandai dalam intelektualitas namun akhlakul karimah yang juga baik. Semua yang ada sudah dijelasakan di atas, merupakan kesempatan dan keunggulan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam untuk benar-benar memberikan sumbangsih yang *real* (nyata) terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggung jawab yang besar dan harapan umat Islam yang tinggi pula, seyogyanya pula di topang dengan pelbagai sistem dan strategi jitu untuk dapat membuktikan bahwa Pendidikan Tinggi Agama Islam merupakan menjadi piilihan utama bukan alternatif. Dalam pandangan beberapa tokoh menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan fungsinya yang besar Peguruan Tinggi Agama Islam membutuhkan pengetahuan terhadap *knowlegde of management.* HAR Tilaar yang menyebutkan kesuksesan ilmu manajemen dan bisnis sudah merebak dan masuk dalam pendidikan di Dunia, oleh sebab itulah pendidikan pun harus membenahi sistem dan manajerialnya untuk menjawab tantangan zaman.[1]

Selain HAR. Tilaar, Muhaimin juga menjelaskan untuk menjadikan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam sebai *main choices* (pilihan utama) dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga negara Indonesia, maka Lembaga Pendidikan Tinggi Islam seyogyanya mengimplimentasikan *aimed* (tujuan) pendiriannya, yakni sebagai berikut : 1). Pendidikan Islam harus merupakan *solving tomorrow's problem todays.* 2). Pendidikan Islam harus mengimplementasikan *good goverment.* 3). Pendidikan Islam mengelola *human capital* yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Islam.[2]

Namun, Permasalahan negara berkembang (*Developing country*) – termasuk Indonesia -pada saat ini adalah ketidakseimbangan antara lembaga pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi-sosial. Secara skala nasional,

---

[1] HAR. Tilaar., *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 89

[2] Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganggguran terdidik tergolong masih banyak. Produktivitas peserta didik di Indonesia sangatlah besar, namun mayoritas produksi pendidikan (*Human capital*) dan pengguna jasa layanan produksi pendidikan, tidak terserap langsung dan berkelanjutan oleh program pemerintah. Produkstivitas pendidikan malah menimbulkan tanggung jawab baru bagi pemerintah untuk menyediakan lowongan pekerjaan lain. Akhir-akhir ini ada banyak wacana yang menyebutkan untuk membentuk sekolah yang berbasiskan kepada pertumbuhan ekonomi. Sehingga kualitas lulusannya bisa menjadi penyelesaian (*Solver*) permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan membuat sekolah yang berbasiskan kepada daya saing tinggi dunia internasional atau bahkan kedaerahan. Dengan harapan, lulusan sekolah bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat luas.

Kulitas lulusan *(Greduate)* menjadi *mainstream* Lembaga pendidikan. Jikalau lulusannya mempunyai sumbangsih yang signifikan didalam masyarakat tidak dapat dipungkiri lembaga tersebut akan menjadi *center of attention* dari masyarakat. Sebaliknya jika lulusannya merupakan *un-usefull greduated* maka masyarakat akan mempertanyakan proses pendidikan yang ada didalam lembaga tersebut.

Secara sederhana untuk mengukur produktivitas pendidikan, menurut Thomas terbagi menjadi tiga dimensi. *Pertama,* Meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif. Yakni proses pelayanan yang diberikan oleh guru, sekolah dan juga pihak lain yang berkepentingan. *Kedua,* Meninjau produktivitas dari segi keluaran perubahan perilaku, dengan melihat nilai-nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh oleh peserta didik sesuatu gambaran prestasi akademik. *Ketiga,* Melihat produktivitas sekolah dari keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yang ada disekolah.[3]

Pembahasan kualitas lulusan di atas - untuk menyediakan lulusan yang menjadi *solve* dari permasalahan pertumbuhan ekonomi – Lembaga Pendidikan Tinggi merupakan proses pendidikan yang paling relevan untuk menjadi induknya (*Power house*). Pasalnya, Perguruan Tinggi (PT) menjadi level tertinggi dari proses pendidikan yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan produksi pendidikan yang secara langsung membantu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.

Tanggung jawab pendidikan tinggi yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pada pasal 20 ayat (1) perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. (2) perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.[4] Sehingga menurut Sylviana Murni program yang relevan dalam pendidikan tinggi dalam hal pembangunan nasional harus bertujuan untuk: 1). Melakukan penataan sistem pendidikan tinggi. 2). Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja. 3). Meningkatkan pemerataan

---

[3] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 92-93.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan akses pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu namun berprestasi dalam hal akademik.[5]

Clark Kerr dalam penelitiannya menyebutkan realitas mendasar dari universitas adalah pengakuan lebih luas bahwa pengetahuan baru adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial.[6] Ada dua alasan yang melatar belakangi penelitian tersebut. *Pertama,* karena pendidikan membenarkan bahwa programnya menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan menyediakan tenaga-tenaga kerja yang kompetetif, profesional dan juga mempunyai pemikiran yang *briliant*. *Kedua,* Pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berimbang membutuhkan integritas antara pengetahuan dan pengembangan ekonomi – sosial. Lembaga Pendidikan membentuk satu iklim pemikiran-pemikiran yang inovatif, sedangkan ekonomi sosial memberikan post-post yang bisa digeluti dari hasil inovasi pemikiran tersebut.

Dari landasan Undang-Undang dan pemikiran di atas maka bisa disimpulkan salah-satu penentuan kualitas lulusan dari lembaga pendidikan tinggi adalah kemampuan (*Skill*) dan kapabilitas (*Capability*) untuk mendapatkan dunia kerjanya sesuai denga profesionalisme pendidikannya yang sudah dihelatinya.

Melihat responsibilitas tinggi yang semestinya ditanggung oleh lulusan dari suatu lembaga pendidikan tinggi tidak pelak kalau tanpa ditopang dengan

---

[5] Prof. Dr. H Veithzal Rivai M B.A & Dr. Hj. Sylvian Murni, S.H. M. Si. *Education manajemen : analisis teori dan praktik.* (jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009) Hal. 100

[6] Joy A. Palmer. *50 Pemikir Islam dari peaget sampai masa sekarang.* (Yogyakarta : Jendela 2003) Hal 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem manajerial dan kebijakan yang juga membantu peserta didiknya (Mahasiswa) untuk menemukan dunia kerjanya. Ada banyak universitas yang membentuk satu kebijakan-kebijakan menarik untuk memberikan akses bagi mahasiswanya mengetahui dunia kerjanya. Sebut saja, Institut Tekhnologi Bandung (ITB), lembaga pendidikan tinggi ini mempunyai kebijakan bekerjasama dengan *Microsoft* dalam hal sertifikasi lulusannya. Sehingga setiap lulusan yang dimiliki oleh ITB mempunyai kualitas yang tidak berbeda dengan lulusan lembaga yang dibuat *Microsoft*.

Sedangkan Pendidikan Tinggi yang dibawah DEPAG berlomba-lomba pula untuk mengganti statusnya yang dari IAIN menjadi UIN. Hal ini disebabkan untuk memperluas akses pengetahuan umum yang berbasiskan pekerjaan bisa masuk dalam naungan lembaga yang berbasiskan Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh ITB dan beberapa Universitas lainnya, merupakan satu kebijakan logis, berdasarkan trend tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Masyarakat Indonesia pada saat ini memang lebih membutuhkan pekerjaan ketimbang kemampuan intelektual yang sangat mendalam. *Policy* ini pula, disebutkan oleh Ahmad Sudradjat bahwa pendidikan Indonesia pada saat ini sudah mengarah kepada Prgamatisme pendidikan.[7] Pemberlakukan *broad based eduacation system* melalui sekolah kejuruan misalnya, merupakan satu

[7] Pragmatisme merupakan satu aliran yang ada di masyarakat Amerika dikala itu, yang mempunyai pemikiran bahwa selurung eksistensi tentang sesuatu adalah manfaatnya dan keberfungsiannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pragmatisme pendidikan : yakni pendidikan yang hanya diukur menggunakan azas kemanfaatan saja bukan pada aspek-aspek lainnya. Semisal menumbuhkan satu kesadaran individual yang ada didiri mahasiswa atau siswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengenalan bagi peserta didik untuk mengetahui dunia kerjanya bukan untuk menanamkan satu sifat yang berkarakter kebangsaan, keagamaan dll. sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Ada sebuah pendapat menarik dari pragmatisme pendidikan yang ada di Eropa: Quakerisme: [8] tatkala struktur sosial yang dilihatnya kurang mencerminkan kepercayaan (Ideologi) dan nilai yang dianutnya. Sangatlah penting bagi anak petani desa untuk menemukan dunia yang membenarkan dan mensahkan nilai-nilai yang ditanamkan ayah atau ibunya (Pen. Seorang petani).[9]

Pendapat yang ada di atas, terimplikasi menjadi wajah baru pendidikan pasca reformasi. Masyarakat Indonesia mulai menemukan satu bentuk baru pasca beberapa konflik kepentingan yang ada di masa orde baru. Lembaga Pendidikan Islam sudah menemukan bentuknya dan bersaing secara *fair* dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Tanggung jawab pendidikan tinggi Islampun dituntut untuk menyerupai lembaga-lembaga lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan satu kebijakan-kebijakan yang selalu relevan dengan satu bentuk tuntutan zaman.

Relevansi pendidikan tinggi Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia mungkin hanya bisa dijawab menggunakan satu bentuk kelembagaan yang mengguakan kurikulum *input-output oriented.* Kemudian, juga mengklasifikasikan subkultur pendidikan pada satu kebutuhan pasar (*Market oriented*). Dari sekian banyak bentuk-bentuk lembaga pendidikan tinggi Islam

---

[8] Pengikut dari pemikir pendidikan bernama Quakeri.
[9] Joy A Palmer, *50 Pemikir Islam dari peaget...*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dan mendapatkan satu bentuk profesionalisme setelah mereka menyelesaikan bidang studinya di Lembaga Tinggi tersebut.

Sebut Fakultas saja Tarbiyah (Pendidikan) *output* yang diharapkan menjadi pendidik (Guru) yang profesional, Syariah (Hukum dan Ekonomi Islam) lulusan yang diharapkan menjadi Advokat Hukum (Pengacar sebagai Profesinya), Akuntan, Banker, Dakwah (Sosial, Psikologi dan Komunikasi) lulusan yang diharapkan bisa menjadi Sosiolog, Psikolog Islam handal dan juga Wartawan. Dari seluruh *output* yang diharapkan sudah dibekukan sebagai bentuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal yang ada diatas, Fakultas masing-masing memberikan kebijakan dalam bentuk bekal studi yang bisa menghantarkan ilmunya dikembangkan terhadap profesionalisme kerjaan. Adapun bentuk-bentuknya dikenal dalam lembaga tinggi sebagai *magang,* Fakultas Tarbiyah di sekolah-sekolah, Syriah di Kehakiman, Dakwah di Dapur Redaksi sebuah majalah atau pertelevisian.

Ada dua Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang masih belum jelas kualitas outputnya dalam hal *link and macthn*ya terhadap dunia kerja. Yakni Fakultas Adab dan Fakultas Ushuluddin. Di Brosurnya, hanya disebutkan sebagai mahasiswa yang ahli dalam hal bidang studi yang digelutinya tanpa memperhatikan bentuk dunia kerja yang dibutuhkan oleh pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Untuk menentukan *market* (Pasar) dalam disiplin ilmu tersebut hanya dua lembaga pendidikan Islam yang menurut penulis mempunyai *gap* (Jarak) cukup jauh dengan dunia kerja. Drs. B. Suryosubroto menyebutkan dikala sekolah hanya mengandalkan satu bentuk intelektual growing tanpa melihat kebutuhan-kebutuhannya untuk mengembangkan masyarakat. Dibutuhkan satu inovasi-inovasi kebijakan untuk menjaga *trust* masyarakat terhadap lembaga tersebut.[10]

Menurut hemat penulis, sebagaimana permasalahan yang ada di atas bahwa *Gap* (Jarak) antara bidang keilmuan dan dunia kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diminimalisir dibutuhkan satu bentuk kebijakan-kebijakan yang inovatif. Menurut hemat penulis dua Fakultas tersebut ada dan terus eksis sampa pada saat ini, merupakan bukti mereka mempunyai strategi jitu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oleh karenanya, penelitian ini mengangkat judul " **STRATEGI KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN** (Studi Kasus di Fakultas Adab dan Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya)"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kebijakan yang ada di Fakultas Adab dan Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya?

---

[10] B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimakah program-program dalam meningkatkan kualitas lulusan di Fakultas Adab dan Ushuluddin di IAIN Sunan Ampel Surabaya?
3. Bagaimanakah strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas lulusan di Fakultas Adab dan Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan proses kebijakan dan analisis dalam proses kebijakan yang ada di Fak. Adab dan Ushuluddin di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Mendiskripsikan program-program kebijakan di Fak. Adab dan Ushuluddin di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Menjelaskan relevansi kebijakan dalam kaitannya dengan pengembangan mutu lulusan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti:
   a. Sebagai pengembangan pengetahuan dari teoritis kepada aspek *field reaseach* sehingga menimbulkan sebuah kematangan intelektualitas tidak hanya dalam tatanan teoritik melainkan juga pada aspek prakteknya.
   b. Untuk menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian tugas akhir (SKRIPSI) dalam menempuh studi strata satu (1) di Fakultas Tarbiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Bagi Obyek Penelitian
   a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai lembaga pendidikan tinggi Islam dalam hal membentuk karakteritik kebijakan yang ada di Fak. Adab dan Ushuluddin
   b. Sebagai bahan masukan bagi pengelola lembaga pendidikan tinggi Islam khususnya yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya
   c. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk mengembangkan sikap ilmiah dan sebagai bahan dokumentasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai sumbangan kepada IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya kepada perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khasanah intelektual pendidikan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, berikut dijelaskan terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam pembahasan.

1. Strategi berasal dari kata Yunani Strategos, yang berarti Jenderal. Oleh sebab itu selalu dinisbatkan sebagai "seni para jenderal". Secara terminologis strategi beararti penempaan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan internal maupun eksternal[11]

---

[11] George A Steiner (terj), *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta : Airlangga, 1988) Hal 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kebijakan adalah satu kompromi yang dilaksanakan oleh pimpinan untuk mengakomodasi kepentingan, menyelesaikan masalah yang ada di dalam satu lembaga[12]. Carter V. Good (Dalam Imron, 2002:18) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors...*[13] Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.
3. Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam, ini dimaksudkan lembaga yang ada dibawah naungan Departement Agama yang mengakomodasi seluruh disiplin ilmu yang ada didalam agama Islam. Secara teknis akademis, pembinaan Perguruan Tinggi Islam Negeri dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Departemen Agama. Ada tiga bentuk Lembaga Pendidikan Tinggi Islam : (1) Institut Agama Islam negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) [14]
4. Peningkatan Kualitas Lulusan *(Greduated educational quality)*. Yakni mutu lulusan yang sudah disesuaikan dengan instrumen-instrumen yang digariskan dalam upaya mencetak peseta didik.[15]

---

[12] Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (INIS : Jakarta, 2004), Hal 23

[13] *Ibid*,, Hal 24

[14] wikipidia.ensklopidiabebas.org

[15] Drs. Umaedi, M.Ed Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum (1999 : Dirdepdiknas), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud dengan **Strategi Kebijakan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam dalam Meningkatkan lulusan** adalah satu bentuk prosedur (pola) pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan pelbagai bentuk-bentuk kebijakan yang bias meningkatkan kualitas lulusan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian yang penulis maksudkan adalah penelitian deskriptif kualitatif (analisa isi). Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Fakultas Adab dan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

   b. Penentuan lokasi penelitian

      Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pendidikan milik Negara yaitu. Fakultas Adab dan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya di Jalan A. Yani 117 Surabaya.

   c. Sumber Informasi Data

      1) Sumber yang dimaksud adalaha beberapa informan yang kemudian bisa menghasilkan sebuah penelitian yang konfrehensip dan menjadikan penelitian ini layak sebagai sebuah hasil karya Ilmiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

(1) Dekan Fakultas.

(2) Ketua pengendalian Mutu Dosen dan Mahasiswa dilingkup Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Metode Pengumpulan Data

a. *Metode Observasi*

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomen-fenomen yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.[16]

Sedangkan menurut Mardalis, observasi atau pengamatan merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.[17]

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data secara langsung dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi, untuk memperoleh data lengkap

---

[16]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 199), hal. 136.

[17]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kondisi umum Fakultas Adab dan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya

b. Metode wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini Sutrisno Hadi mengatakan interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu menghadap orang lain dan mendengarkan dengan sendiri suaranya. tampaknya merupakan alat pengumpul data (informasi) yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpadu maupun manifes.[18]

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[19]

Metode wawancara ini dilaksanakan untuk pendalaman (*deep in*) seluruh aspek fenomena yang terjadi dan juga terlihat dari kasat mata. Oleh karenanya, fenomena-fenomena yang terjadi akan dibenarkan

---

[18]Sutrisno Hadi. *op. cit.*, hal. 192.

[19]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun kemudian disalahkan. Sehingga, dapat ditemukan satu *macthing* antara fenomena eksistensi yang terbangun dari suatu *idea*.

c. *Metode Dokumentasi*

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.[20]

Dokumentasi dilaksankan untuk proses pembuktian dari seluruh tekhnik pengumpulan data yang ada di atas. Fenomena yang terlihat, kemudian aspek wawancara, hingga akan dibuktikan melalui prosedur dokument-dokument yang tersimpan di objek penelitian yang dilaksankan oleh penulis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data,

[20] Suharsimi Arikunto. *op. cit.*, hal. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjabarkannnya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.

Dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya penulis dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh dilapangan.

Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah, yaitu : persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian.[21] Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisi content (*content analysis*) dari beberapa hal yang ada di permalasahan tersebut.[22]

Setelah melaksanakan proses content analisys tentang kesesuain teori dan temuan-temuan yang ada dilapangan penulis akan melaksanakan satu prosedur analisis selanjutnya. Yakni *framing analysis* (analisis bingkai)[23]. Analisis ini biasa dilaksanakan dalam prosedur analisis sosial. Misalnya saja, Peter L Beger dalam teori konstrusionisnya menyebutkan dalam tatanan penelitian sosial dibutuhkan rekonstruksi kasus sehingga menghasilkan satu bentuk penelitian sosial yang objektif.[24]

---

[21]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PrakteK,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 209

[22] Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2000), 177-178.

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001),154

[24] Ery Erianto, *Analisis Framing konstruksi, Ideologi dan politik Media.* (Jogjakarta : LkiS, 2007), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dua prosedur akan dilaksanakan penulis untuk tidak hanya menilai hasil kajian teoritik dan temuan lapangan. Melainkan juga menjelaskan keterikatan tentang antar teori, fenomena, data dan produk yang dihasilkan di objek penelitian yang penulis lakukan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dalam skripsi ini maka sistem pembahasan ini dibagi menjadi empat: *Bab pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang ; Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pembahasan, dan sistematika pembahasan. Pada *bab kedua* adalah landasan teori yang terdiri dari: 1) Memahami Terminologi Kebijakan Pendidikan secara umum. 2) Konsep dan bentuk formulasi kebijakan yang diciptakan didalam pendidikan tinggi Islam. 3. Strategi atau Metodologi dalam meningkatkan kualitas lulusan didalam lembaga pendidika islam

Bab ketiga; adalah penyajian data dan analisa data terdiri: Sejarah Obyek penelitian Bentuk-bentuk visi, misi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan program pada obyek penelitian, dan analisa data yaitu analisa hasil temuan dan penyelarasannya dengan landasan teori *Bab keempat* adalah; langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif serta diakhiri dengan penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan membutuhkan identifikasi masalah, analisa, dan data. Setelah itu, kebijakan bakal menjadi landasan kegiatan. Pada umumnya, kebijakan dibentuk untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan – dalam tatanan sebuah kasus - bisa dikategorikan menjadi dua macam, *Pertama* kebijakan yang dimulai dengan pelbagai prosedur pembuatan kebijakan yang biasanya tercatat atau ditulis melalui notelensi rapat. *Kedua* ada kebijakan yang dibuat secara seketika itu juga (*accidental*), tanpa sebuah prosedur. Pasalnya, problem (masalah) yang dihadapi merupakan suatu bentuk *accidental problem.*[1] Contoh, ada demo diluar perusahaan atau lembaga yang menuntut untuk diambil keputusan, agar terhindarkan dari anarkhisme masa. Disaat itu pula, pengelola atau kepala lembaga diwajibkan untuk mengambil kebijakan secara cepat.

Terlepas akankah kebijakan itu akan dibuat secara tertulis ataukah dibuat seketika. Pastinya, kebijakan dilakukan melalui proses sebagai berikut :

ISU	⟶	**PROBLEM**	⟶	**KEBIJAKAN**
(anak tidak sekolah)		(warga miskin)		(pendidikan gratis)

Isu merupakan kabar permasalahan yang diketahui oleh pihak lembaga. Kemudian setelah didiagnosa permasalahannya (problemnya) yakni kemiskinan

[1] Kisbiyanto, *Bunga Rampai Penelitian Manajemen Pendidikan*, (Semarang : Rasail Media Group, 2008), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi di masyarakat, sehingga menuntut kebijakan yang bisa menjembatan untuk menyelesaikan permasalah tersebut.[2] Dalam kasus ini adalah pendidikan gratis.

Praksis, sebenarnya pengetahuan tentang kebijakan bisa diketahui secara tampak. Hal ini dikarenakan masyarakat – termasuk kita – adalah objek dari kebijakan yang biasa dibuat oleh pemerintah atau lembaga. Namun, secara teoritik perlu kiranya untuk dikaji apa makna kebijakan secara etimologis, atau terminologis. Secara etimologis (bahasa) dalam kebijakan diartikan sebagai : *"Political sagacity; statecraft; prudent conduct; craftiness; course of action adopted by government, party, etc."*[3] Dalam Kamus bahasa indonesia, terkadang ada deferensiasi antara kebijakan dan kebijaksanaan. Namun, menurut Dr. Abd. Rahman Assegaf, kebijakan dan kebijaksanaan bisa disamakan dalam arti implementatifnya. Kebijakan akan mendukung timbulnya kebijaksanaan, sedangkan kebijaksanaan akan menimbulkan kebijakan yang baik.[4]

Secara terminologis, Kebijakan biasa digunakan dalam dunia pemerintahan, *Policy* (kebijakan) terikat erat dengan kehidupan masyarakat. Peraturan-peraturan pemerintah menjadi titik tolak sebagai salah satu bentuk kebijakan. Di Yunani kuno, kebijakan ini dilaksanakan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*). Adapun yang dimaksud Pembuat Kebijakan adalah seseorang

---

[2] Ali Imron, 1995, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara

[3] Jhonathan Crowther ed, *Oxford Advance Learners dictionary* (New York : Oxford University Press, 1995), 893

[4] Abd. Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta : Kurnia Kalam, 2005), 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yang memiliki jabatan tertentu), lembaga ataupun pemerintah yang merumuskan tujuan, capaian dan juga penyelesaian dari sebuah permasalahan yang sedang dialami[5]. Adapun kebijakan itu sendiri adalah bentuk-bentuk rumusan dari analisis, peramalan (*forecasting*) dan konklusi yang disepakati bersama kemudian menjadi bentuk program-program yang wajib untuk dilaksanakan[6].

> H.A.R Tilaar : Kebijakan Pendidikan merupakan rumusan dari berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pencapaian kedua pesan konstitusi untuk pendidikan nasional dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut direncanakan dapat diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institution*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal[7].

Menurut Muhammad Sirozi, Kebijakan adalah kompromi politik antara citera yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan pendidikan yang harus berjalan. Jadi, kebijakan akan menimbulkan bias dan resistensi. Dapat dipastikan tidak memungkinkan adanya kebijakan "netral" kebijakan selalu tidak netral.[8]

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan diakui sebagai satu bentuk kajian tersendiri. Kebijakan dalam ranah pendidikan bisa dikategorikan dalam tiga level (tingkatan). *Pertama*, Kebijakan Makro yakni kebijakan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional (DIKNAS) atau

---

[5] Supandi dan Ahmad Sanusi, *Kebijakan dan Keputusan pendidikan* (Jakarta : Dep. Dikti, 1988), 11

[6] Moh. Sirozi, *Politik Pendidikan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 2004), 09

[7] HAR. Tilaar., *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 7

[8] Muhammad Sirozi, *ibid*, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama (DEPAG). Seperti Ujian Nasional, Sertifikasi Guru dan Dosen, atau pemberlakuan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kedua, Kebijakan Meso yakni kebijakan yang dilaksanakan oleh departement-departement di tingkat provinsi dan kabupaten. Misalnya, pemberlakuan kurikulum kearifan lokal (*local wisdom*), dan pembelajaran bahasa lokal masing-masing daerah, atau kebijakan perluasan SMK ketimbang SMA sebagaimana yang marak dilakukan kota-kota besar di Indonesia, semisal Surabaya, Jakarta, Gorontalo dan masih banyak lainnya.

Ketiga adalah Kebijakan Mikro yakni kebijakan yang ada pada tingkat lembaga – lembaga, meski secara Makro ataupun Meso diatur sedemikian rupa. Namun, kebijakan sekolah bisa saja tidak sama. Desentralisasi pendidikan menjadikan sekolah bebas untuk menciptakan budaya organisasinya sendiri untuk mencapai target tujuan pendidikannya masing-masing pada tingkat Mikro. Pada aspek kebijakan ini pulalah, yang menjadi fokus pembahasan. Yakni, bagaimana sekolah dalam membentuk satu kebijakan yang dibutuhkan *(need)* untuk menyelesaikan problematika sekolah[9].

Kebijakan membutuh pola atau strategi, kebijakan tidak bisa berdiri sendiri menjadi satu produk simpulan dari proses penyelesaian masalah. Dengan demikian, kebijakan membutuhkan stategi yang dapat menyampaikan pesan-pesan tujuan yang diinginkan dari setiap kebijakan. Oleh sebab itu, perlu kiranya

---

[9] Sam. M. Chan dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah; Analisis SWOT*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan penjelasan sedikit tentang eksistensi strategi di dalam suatu kebijakan yang akan dikelurkan baik oleh lembaga maupun organisasi.

Pengertian strategi – sebagaimana dalam buku Manajemen Strategis - adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka panjang, yang menyesuaikan sumberdayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kleinnya untuk memenuhi harapan *stakeholder*.[10]

Amstrong - masi di dalam buku yang sama - menambahkan setidaknya ada tiga pengertian strategi. *Pertama* merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan sungguh-sungguh sumber daya yang penting untuk pengembangan jangka panjang. *Kedua*, strategi merupakan sebuah perspektif yang bisa didiskusikan untuk kemudian menghasilkan keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak besar yang berjangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi.

Yang terakhir, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan (tujuan strategis) dan mengalikasikan atau menyesuaikan sumber daya dan peluang (strategi berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumber dayanya.[11] Dari pengertian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pola, cara atau rumusan

---

[10] Triton PB, *Manajemen Strategis*, (Jogjakarta : TUGU, 2007), 15.
[11] Triton PB Manjemen Strategis, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat menyampaikan seseorang (pemimpin), organisasi atau dunia usaha kepada tujuan-tujuan yang sudah direncanakan.

Strategi kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk, pola atau cara pengumpulan rumusan keputusan yang akan dimabil oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan (problematika) yang dihadapinya. Dalam konteks pendidikan misalnya, jikalau kebijakannya adalah menggratiskan biaya pendidikan. Maka dibutuhkan strategi jitu untuk bisa mengkomunikasikan tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Selain itu, juga dibutuhkan strategi pembentukan kebijakan jitu pula agar bentuk kebijakannya tidak salah sasaran, sehingga membuat kebijakan itu menjadi sia-sia.

Dari pendefinisian yang ada di atas, dapat disimpulkan untuk membentuk kebijakan yang holistik dibutuhkan satu gabungan antara strategi pembentukan kebijakan dan strategi pengimplementasian kebijakan. Hal ini perlu dilaksanakan dalam upaya meminimalisir kegagalan yang akan didapatkan apabila saja kebijakan yang sudah direncanakan ditolak oleh objek kebijakan. Strategi pembuatan kebijakan akan dijelaskan secara *detail* dalam penjelasan berikut ini.

B. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa di dalam setiap kebijakan terdapat *policy maker* (pembuat kebijakan). Pembuat kebijakan tidak secara otomastis selalu bisa men-*design* suatu kebijakan tanpa adanya suatu langkah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah prosedural - tentunya hal ini biasanya terhjadi pada proses pembuatan kebijakan strategis yang membutuhkan jangka panjang untuk dilaksanakan -. Dalam hal ini pembuat kebijakan membutuhkan kejelian dan kelihaian dalam mencari kebijakan yang tepat dan antisipasi yang juga relevan disaat kebijakan ini di implementasikan menjadi program kerja.

Tidak sedikit kebijakan yang dibuat berakhir sia-sia atau bahkan ditolak oleh banyak orang karena tidak relevan. Semisal Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), kebijakan makro melalui Undang-Undang ini sebenarnya dilaksanakan ditahun ini. Namun, dikarenakan mayoritas lembaga pendidikan belum siap untuk memberlakukannya akhirnya, undang-undang tersebut belum juga ditanda-tangani presiden.

Ada yang paling fenomenal, yakni Kebijakan Ujian Nasional (UN), baru-baru ini MA menerima pengajuan gugatan untuk tidak diberlakukannya Ujian Nasional, dan menvonis ujian nasional boleh dilaksanakan dengan syarat, sekolah-sekolah yang ada di daerah mempunyai sarana dan kualitas yang sama dengan yang ada di provinsi atau kota. Tak ayal, Kebijakan yang sudah sekian tahun dilaksanakan malah dianggap oleh masyarakat menyengsarakan. Semua guru-guru yang ada di daerah berupaya untuk menolak adanya Ujian Nasional sebagai satu-satunya syarat kelulusan.

Sedangkan yang ada di lingkup mikro (lembaga) kebijakan yang paling sering ditolak adalah kenaikan biaya pendidikan, sistem pendidikan yang baru dan lainnya. Maklum, kenaikan biaya pendidikan seakan merefleksikan persepsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang komersialisasi pendidikan, dan konspesi bahwa kebijakan itu dibentuk untuk memperkaya diri dan sedikit manfaat yang bisa dirasakan oleh peserta didik, ataupun civitas akademika. Perubahan pola pendidikan pun tidak luput dari penolakan. Pasalnya menurut Renald Kasali, dalam dunia pendidikan seakan-akan punya budaya laten yang sangat kuat. Budaya organisasi yang sudah berjalan lama sangat sulit untuk dirubah.[12] Hal ini dibutuhkan keberanian pemimpin untuk mengkominikasikan tujuan yang diharapkan oleh Lembaga Pendidikan tersebut.

Oleh karenanya, sangatlah dibutuhkan satu prosedur jelas untuk menganalisa proses pembentukan kebijakan untuk menghindari resistensi dari kebijakan tersebut, selain itu juga untuk bisa diimplementasikan tanpa meimbulkan masalah beru akibat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam beberapa pandangan tokoh, menurut George A. Stiener dan J. B. Miner dalam melakasanakan proses pembuatan kebijakan dibutuhkan analisa masalah dengan proses pengkategorian masalah melalui Baik, Sedang dan Rumit. Dari rumusan permasalahan sudah didiagnosa ada formulasi selanjutnya yakni dengan pengambilan keputusan, penilaian alternatif-alternatif solusi dan peramalan dampak yang akan diakibatkan oleh kebijakan (*out put policy*) yang dilaksanakan.[13]

Oleh karenanya, didalam permasalahan pendidikan, pada saat ini – khususnya di negara yang berkembang – adalah pengelolaan akses *out put* yang

---

[12] Rhenald Kasali, *Change*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 271

[13] Ace Suryadi, *Analisis Keijakan Pendidikan; Suatu pengantar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan oleh lembaga pendidikan terhadap dunia kerja atau pasar. Ini hanya sebagaian permasalahan yang masih belum bisa dikategorikan, karena masih ada permasalahan yang timbul selain satu masalah itu. Untuk menjawab ini sesuai dengan prosedur di atas perlu kiranya untuk menganalisa permasalahan.

1. Analisis Permasalahan

Analisis Permasalahan merupakan proses awal dalam pembentukan kebijakan. Diagnonasa masalah yang benar maka akan menghasilkan kebijakan yang benar pula. Imbasnya akan meminimalisir resistensi yang timbul kalau kebijakan ini diimplementasikan. Dalam ilmu manajemen, analisa permasalahan biasanya dilaksanakan menggunakan prosedur analisis SWOT (*strength, weakness, oppurtounities, treatments*).

Analisa permasalahan adalah proses pengidentifikasian kecendrungan, faktor, dan fenomena yang mungkin mempunyai dampak penting terhadap penyusunan strategi kebijakan. Ada beberapa alasan yang menimbulkan pentingnya *audit* (analisis) permasalahan. *Pertama* setiap perusahaan tidak mempunyai kesamaan masalah, semua perusahaan ataupun lembaga mempunyai kecendrungan yang berbeda-beda dan permasalahan yang juga berbeda-beda.

Kedua, untuk menekankan pentingnya penilaian sistematis terhadap dampak lingkungan. Kebijakan yang bagus, adalah mereka mempunyai basis data banyak. Dan kandungan fenomena-fenomena yang beragam. *Ketiga* untuk memperdebatkan pandangan-pandangan berbeda mengenai perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan yang relevan. *Keempat* mengjelaskan pandangan-pandangan yang kabur dalam terminologi kebijakan yang diinginkan sehingga dapat menggunakan bahasa relevan agar dipahami oleh seluruh pihak.[14]

Permasalahan-permasahan ini harus pula berbasis pada data-data yang bisa dipertanggung jawabkan. Basis data ini kemudian bisa dikolumkan kepada bingkai permasalahan yang bagus.[15] Contoh bingkai permasalahan adalah sebagai berikut :

Komponen	**Struktur Msalah**		
	Baik	**Sedang**	**Rumit**
Pembuatan Keputusan	Sedikit/ seorang	Sedikit/ seorang	Banyak
Alternatf	Terbatas	Terbatas	Tak terbatas
Utiliteis/nilai	Consensus	Consensus	Konflik
Outcomes/konsekwensi	Pasti/resiko	Tidak pasti	Tidak diketahui
Kemungkinan	Diperhitungkan	Tidak dapat diperhitungkan	Tidak dapat diperhitungkan

Table 1 : Struktur masalah

Tabel ini menjelaskan sturktur permasalahan dan kebutuhan terhadap *policy maker*-nya. Kalau anggapan masalahnya adalah hal yang mudah untuk diselesaikan maka, *policy maker*-nya hanya dibutuhkan orang yang sedikit, sedangkan pilihan solusinya juga terbatas, resiko yang akan diambilpun akan

[14] HAR. Tilaar dan Riant Nugroh, *Kebijakan Pendidikan,* (Jogjakarta : Pustakan Pelajar, 2008). 89

[15] HAR. Tilaar dan Riant Nugroho *Kebijakan pendidikan.* 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit dan kemungkinan kegagalannya dapat diperhitungkan. Begitu pula sebaliknya, jika yang dihadapi permasalahan yang rumit, decision makernya melibatkan banyak orang dan alternatifnya tidak terbatas dan seterusnya.

2. Formulasi

Disinilah strategi-strategi kebijakan dibutuhkan, untuk bisa menghasilkan kebijakan *acceivment*-nya lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus diformulasikan dari hal-hal berikut ini :

a. Tujuan kebijakan, dari masalah-masalah yang diketahui pastilah mempunyai intisari permasalahan. Tujuan awal dari kebijaka biasanya adalah untuk menyelesaika permasalahan. Contohnya, kalau di satu perusahaan mempunyai permasalahan pendanaan (*cost*), maka tujuan dari kebijakan itu haru merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Misi, derivasi dari tujuan-tujuan yang ada diatas. Misi merupakan abstraksi kata-kata yang mewakili dari tujuan itu. Bentuk visi atau tujuan misalnya, "*Perusahaan adalah pelayanan terbaik bagi costumer*". Sebagai pengejewantahan Visi, Misi perusahaan menjadi "*kami adalah pelayanan*", "*menghasilkan produk yang memuaskan*" dan lain sebagainya.

c. Sasaran (objek kebijakan). Hal ini sangat penting untuk dilihat sebagai satu keutuhan yang signifikan, sehingga kebijakan tidak salah sasaran sebagaimana yang dicontohkan diatasm sasaran perusahaan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas produk dan orientasi pada pelanggan. Pastinya, kebijakan-kebijakan mesti dihasilkan mengarah pelanggan yang menjadi objeknya. Bukan pada karyawan yang ada di internal organisasi.

d. Program. Tentu setelah semuanya dilaksanakan dan sudah menjadi kebijakan. Setelah itu, adalah istilah pengembangan kebijakan melalui program-program baik secara jangka pendek maupun jangkan panjang. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan berkelanjutan dan tidak temporal.[16]

3. ***Forecasting* Dampak**

Forecasrting merupakan aspek paling sulit dilaksanakan. *Forecasting* dalam terminologi kebijakan diartikan sebagai peramalan kebijakan. Peramalan dalam suatu kebijakan merupakan proses identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi *pra* dan *pasca* kebijakan dilaksanakan. Probabilitas (kemungkinan) biasanya dianalasis menggunakan kompetensi internal maupun eksternal[17].

Forecasting menentukan arah kebijakan. Efektivitas kebijakan terkadang bukan diukur pada tepatnya formulasi data, sasaran, juga pada dampak dari kebijakan. Melainkan juga diukur kemungkinan akan samanya kebijakan yang dikeluarkan dengan visi, misi dan analisa kemungkinan dalam

---

[16] J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: ANDI, 2003), 16

[17] Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik; Pengantar Proses Berpikir Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996)139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan. Sehingga, dianggap relevan untuk menyelesaikan problematika yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi.

Selain efektivitas, harus ditentukan efesiensi waktu dan membaca kemungkinan-kemungkikan implementasi kebijakan. Terkadang kesalahan kebijakan terletak pada penempatan waktunya, karena para pembuat kebijakan tidak memikirkan kemungkinan pergantian paradgima anggota dalam setiap tahunnya. Oleh karena, peramalan-peramalan tentang efektivitas dan efesiensi kebijakan harus dilaksanakan dengan seksama. Lagi-lagi untuk menghasilkan kebijakan yang bagus.[18]

Selain pada aspek efektivitas dan efesiensi dalam pengimplentasian kebijakan. Kebijakan harus juga meramalkan dampak (*influence*), yang dimaksud dampak adalah imbas yang akan terjadi pada aspek pengimplementasian kebijakan tersebut. Tujuan, visi dan misi kebijakan mungkin hanya tatanan idealisme, sedangkan dampak (pengaruh) bersinggungan langsung dengan objek kebijakan dan orang yang akan melaksanakan kebijakan itu sendiri.

4. Evaluasi

Kebijakan memang tidak selesai pada proses produksi kebijakan, melainkan kebijakan selalu membuat sirkulasi tersendiri dalam pelaksanaannya. Kebijakan perlu dievaluasi, sebagaimana yang disebutkan

---

[18] Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, edisi Revisi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

oleh Jhonson (1992) dalam buku "*manajemen strategic untuk manajemen pendidikan.* Evaluasi merupakan prosedur terakhir dalam kebijakan, evaluasi jugga merupakan seni *controlling* untuk memastikan bahwa apa yang akan dilaksankan akan mengantarkan kepada hasil yang diinginkan.[19]

Dalam kebijakan evaluasi kebijakan bisa dilaksankan pada *pra* dan *pasca* kebijakan, ataupun pada proses eksperimentasi kebijakan. Didalam buku Manajemen strategis disebutkan bahwa evaluasi kebijakan bisa dilaksankan melalui pelbagai pendekatan. *Pertama* Pendekatan kesenjangan, dalam proses pembentukan kebijakan pro-kontra antar team ataupun anggota bisa saja terjadi. Meski kebijakan belum dilaksanakan namun sudah ada penolakan yang dilakukan oleh sebagian anggota. Sehingga, sebelum kebijakan ini dibentuk, seyogyanya diadakan evaluasi lebih awal untuk bisa menghilang bias kesenjangan lebih awal.

Kedua, Pendekatan matrix resiko. Dalam kebijakan pendekatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk mengevaluasi kebijakan yang berisiko rendah ataupun berisiko tinggi. Kebijakan yang berisiko pada salah satu aspek kehidupan anggota ataupun costumer maka dibutuhkan pengevaluasian menggukan matrix resiko ini. Metrix resiko akan menghasilkan karya evaluasi yang bagus berkaitan proses pengambilan kebijakan.[20]

---

[19] Akdon, *Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategic Untuk Manajemen Pendidikan)*, (Bandung: ALFABETA, 2006), 176

[20] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya bagaimnakah proses evaluasi biasanya dilaksanakan dalam prosedur kebijakan maka tabel dibawah ini akan menjelaskannya :

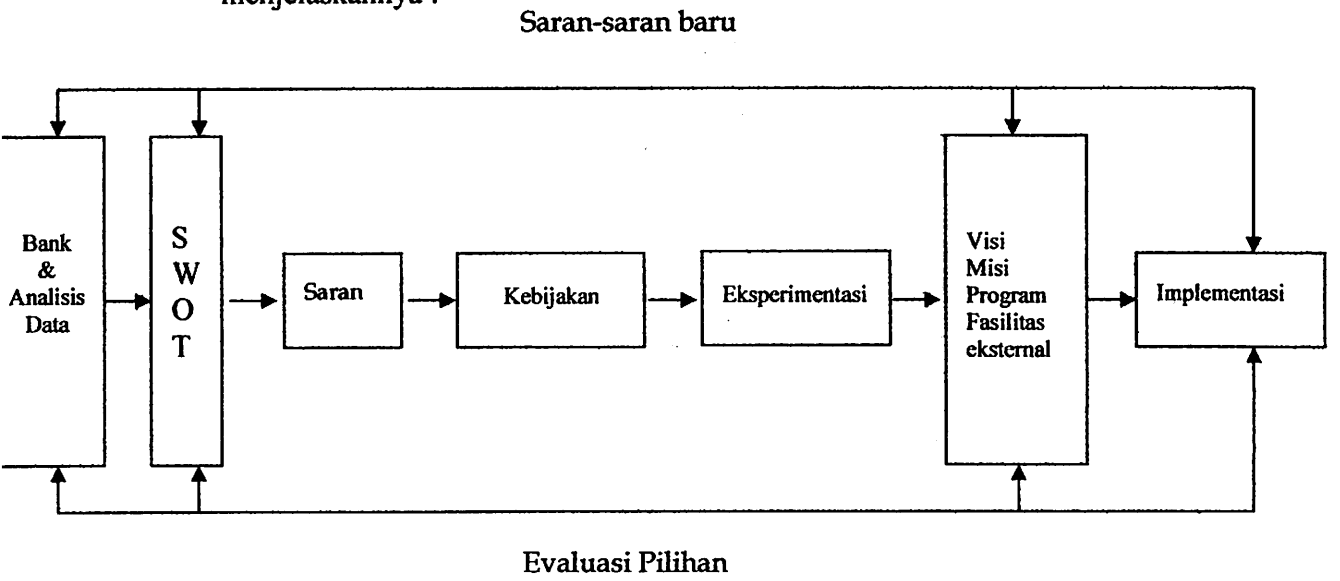

Gamabar 1 : sasaran evaluasi kebijakan

Bagan ini menjelaskan bahwa jangkauan evaluasi merupakan elemen di luar seluruh proses. Secara otomatis, kandungan evaluasi berada lebih luas terhadap prosedur yang ada di dalam proses pengambilan kebijakan. Dari penjelasan ini sebenarnya untuk menghasilkan kebijakan yang bagus (*good policy*) dibutuhkan satu alur yang sangat lama. Namun, hasilnya bisa untuk dipertanggung jawabkan

Proses dan prosedur yang ada di atas lumrah ditemukan di dalam dunia bisnis dan perusahaan. Sedangkan, dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan, dalam studi kebijakan dikategorikan sebagai kebijakan pada lembaga yang *non-laba*. Proses pembuatan kebijakan berbeda karena harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan pada aspek *legal standing* (hukum) yang ada. Contohnya yang ada diatas, BHP merupakan bentuk *legal standing* yang dibahas oleh DPR, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) merupakan aspek kebijakan yang implementatif dan mengatur secara strategik tentang lembaga pendidikan[21].

Dengan demikian, landasan kebijakan di dunia pendidikan biasanya berawal dari Undang-Undang tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, UU Tahun 2003 juga tentang sisdiknas, Peraturan Pemerintah tantan BSPN, dan masih banyak peraturan pemerintah yang lainnya. Dengan demikian, landasan kebijakan di dunia pendidikan biasanya berawal dari Undang-Undang tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, UU Tahun 2003 juga tentang sisdiknas, Peraturan Pemerintah tantan BSPN, dan masih banyak peraturan pemerintah yang lainnya. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik kebijakan sendiri :

1. Memiliki tujuan pendidikan,
2. Memenuhi aspek legal-formal
3. Memiliki konsep operasional
4. Dibuat oleh yang berwenang
5. Dapat dievaluasi
6. Memiliki sistematika[22]

---

[21] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Ditinjau Dari Sudut Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994), 6

[22] Makkasau, *Metoda Analisis Sistem dan Operasional Administrasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski mempunyai karakteristik kebijakan sendiri, secara prosedural kebijakan pendidikan juga melaksanakan prosedur dan proses yang serupa dengan dunia bisnis atau usaha. Karena lembaga pendidikan merupakan bagian integral dari suatu organisasi yang sudah dimasuki sistem dunia bisnis dan manajemen umum.

Dari sekian banyak gambaran tentang prosedur kebijakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

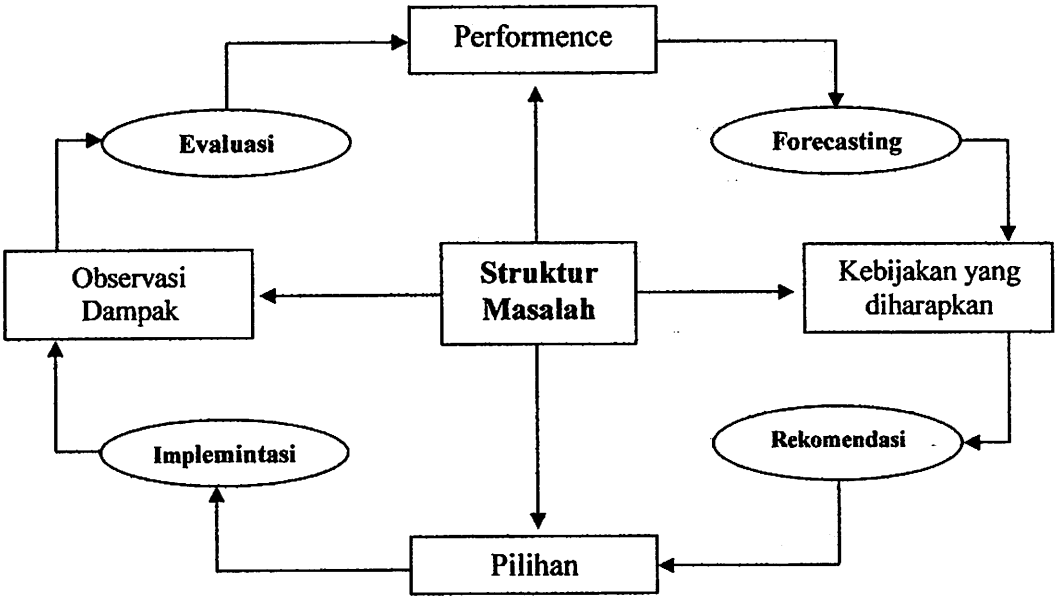

Gambar 2 : Prosedur umum kebijakan

Seluruh kebijakan pasti berawal dari sebuah permasalahan, kemudian menimbulkan pada proses pengambilaan kebijakan. Dalam prosesnya kemudian timbullah peristilahan, *forcasting*, evaluasi, dampak dan implementasi dan seterusnya. Hal semua menjadi kewajiban tersendiri untuk mengambil kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. KONSEP PENINGKATAN KUALITAS / MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Akhir-akhir ini Pendidikan Tinggi (*higher education*) – termasuk pendidikan tinggi islam – mengalami perubahan yang signifikan dalam proses manajerialnya. Seluruh komponen civitas akademika Perguruan Tinggi (PT), mulai menyadari ada kemerosotan proses Pendidikan Tinggi Indonesia. Kekalahan persaingan dengan negara-negara tetangga yang dulunya belajar ke Indonesia menjadi pemicunya[23].

Menurut THES tahun 2006, sebagaimana penjelasan Dr. E. A. Kuncoro Perguruan tinggi yang ada di Indonesia berada di bawah Perguruan Tinggi Singapura, Thailand dan Malaysia. Uneversitas Indonesia yang menjadi *trend* percontohan di Indonesia rupanya berada di urutan ke-250 dunia, dibanding dengan National University of Singpore jauh. Universitas singapore ini berada di urutan 19[24]. Uniersitas Islam Negeri (perguruan tinggi yang berbasiskan Agama Islam) mungkin tidak bisa ditemukan di urutan berapa, bahkan disebutkan disalah satu artikel, bahwa posisi UIN tidak sampai pada 4000 ranking dunia, ditingkat ASEAN juga masih belum masuk ranking 100 besar. Di tingkat Indonesia juga masih belum jua masuk pada 10 besar terbaik dalam sekala nasional[25].

---

[23] Prof. Dr. HAR. Tilaar, "Paradigma Baru Pendidikan Tinggi", Dalam *Kekuasaan dan Pendidikan. Ibid.* 326

[24] Dr. E. A. Kuncoro, SE, "Leadership sebagai primary forces dalam competitive strength, competitive are, competitive result, guna meningkatkan daya saing perguruan tinggi", dalam *Manajemen Corporate dan Strategi pemasaran Jasa Penidikan* (Bandung : Alfabeta, 2009), 93

[25] Dr. Ir. H. Suharyadi, MS Rektor Universitas Mercu Buana *www.skripd.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, departemen pendidikan memberikan kebijakan baru dalam upaya perbaikan terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu strateginya adalah melakukan Akreditasi terhadap proses-proses yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Orientasi Akreditasi tersebut bermula dari pemikiran bahwa membentuk perguruan tinggi yang bagus, diwajibkan mempunyai sertifikatikasi dalam hal pengelolaannya. Tetapi, tidak hanya itu yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional melainkan mereka mensosialisaikan lima pilar paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan :

1. *Quality* (Kualitas/Mutu)
2. *Autonomy* (Otonomi)
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
4. *Accreditation* (Akreditasi)
5. *Evaluation* (Evaluasi)[26]

Timbulnya lima pilar paradigma baru di atas, seyogianya juga diikuti oleh Pendidikan Tinggi Islam (STAIN, IAIN, dan UIN). Sebagaimana yang disebutkan Mantan Rektor UIN Syarif Hidyatullah, Azzumardi Azra bahwa :

> Institut Agama Islam Negeri merupakan bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, IAIN secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasikan dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi Nasional, dan bahkan Internasional, seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada tahun 1998[27].

---

[26]Buku Panduan Penjaminan Mutu (Jakarta : Deriktorat Pendidikan Tinggi Nasional, tt), 1 .

[27] Azzumardi Azra, "IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi", dalam *Problem dan Prospek IAIN; Antologi pendidikan Tinggi Islam,* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi paradigma baru yang ada di atas, pertama-tama akan berimbas pada otonomi pengelolaan pendidikannya sehingga bisa mengembangkan sebagaimana kebutuhan-kebutuhan yang direncanakan dalam setiap 5-10 tahun (RENSTRA). Setelah otonomi ini dilaksanakan, para penyelenggara pendidikan tinggi juga wajib melaksanakan *good governance* yang cirinya adalah transparansi, akuntabiltas dan bertanggung jawab terhadap program-program yang dilaksanakan.

Implementasi selanjutnya dan mungkin yang paling penting dari paradigma baru tersebut adalah *Quality* (kualitas/mutu). Cakupan kualitas lebih besar ketimbang implementasi lainnya. Pasalnya, kualitas berkaitan secara langsung terhadap internal universitas, ataupun eksternal universitas. Mayoritas rakyat Indonesia saat ini terkena gejala konsumerisme, keterikatan antara isntansi pendidikan dengan kualitas produktifitasnya sangat erat. Tidak sedikit, masyarakat Indonesia lebih memilih *trend* barang yang berkualitas ketimbang barang murah. Oleh sebab itu, dapat dipastikan kualitas akan menjadi sentral pilihan masyarakat Indonesia saat ini ketimbang murah namun tidak berkualitas.

1. Pengertian Quality (Kualitas/Mutu)

Quality (kualitas/mutu) menurut Juran (1981) adalah *fitness for use* (kesiapan untuk bekerja). K. Iswaka juga menyebutkan bahwa Kualitas adalah *meeting costumer satisfaction* (mempertemukan kepuasan pada pelanggan).[28] *Global Alliance for Transnational Education* (GATE), mengatakan bahwa

[28] Pendapat ini bisa dilihat di dalam buku Azzumardi Azra *antologi pendidikan tinggi islam*,3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutu adalah *as meeting or fulfilling requirement* (mempertemukan atau memenuhi permintaan), *Fitness to Purpose* (kecocokan dengan yang diharapkan)[29]. Di dalam kasus Pendidikan Tinggi Islam yang lebih mengarah kepada corak keagamaan dan *Al-Azhar centered* sehingga dalam beberapa tahun terakhir peristilahan "mutu/kualitas" tidak bisa ditemukan secara signifikan pengertiannya. Namun, landasan-landasan bahwa *mutu* didalam juga merupakan sebuah ciri khas dalam bertindak dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Dr. H. Muhaimin, landasan penjaminan kualitas Pendidikan Tinggi Islam, bisa ditemukan di Surat, al-Qashas: 77, al-Kahfi: 110, al-Na'jm: 39, al-Sajadah dan masih banyak yang lainnya. Kesimpulannya adalah setiap orang Islam tidak boleh bekerja secara sembrono, mereka harus bekerja secara optimal dan berkomitmen terhadap hasil kerja yang bermutu atau sebaik-baiknya[30].

Kajian etimologi diatas, dalam bentuk pengimplikasian (definisi operasionalnya) kualitas biasanya diartikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

a. Mutu mencerminkann karekteristik yang dimiliki (*valuable* dan *excelence*)
b. Mutu sebagai pendekatan metafisik (deskriptif tapi juga evaluatif)[31].

---

[29] Veithzal Rivai, M.B.A & Sylviana Murni, S.H, M.S,i. *Education Manajemen* .712

[30] Prof. Dr. H. Muhaimin, MA Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Malang, (Malang : UIN Malang, 2005) 11-12

[31] Veithzal Rivai, M.B.A & Sylviana Murni, S.H, M.S,i. *Ibid.*712

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemaknaan bahwa mutu/kualitas sebagai satu bentuk karateristik yang bernilai dan keunggulan, bermula dari pandangan Harvey dan Green yang mengatakan bahwa kualitas produk akan mempunyai nilai atau tidak sangatlah relatif, kepuasaan seseorang tidak bisa di *uniform*-kan. Subjektifitas seseorang tidak mungkin untuk dirubah sesuai selera pasar. Oleh karenanya, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bermutu adalah lembaga yang mempunyai *different characteristic* dengan keluaran (produk) lembaga lainnya.

Sedangkan yang kedua, ini menjelaskan bahwa kualitas itu bukan hanya sesuatu yang metafisik (berbentuk angan-angan), namun kualitas harus bisa dirasakan dan dapat dievaluasi. Kejadiaannya adalah kualitas kadang hanya ditawarkan sebagai satu bentuk upaya menarik pelanggan (*costumer*) dan kepuasaannya tidak dapat dirasakan. Jadi, deskripsi-deskripsi yang ditawarkan bisa dievaluasi.

Untuk lebih jelasnya tentang apa makna Mutu Pendidikan Tinggi, definisi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa mutu Pendidikan Tinggi adalah pencapaian tujuan dari kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pendidikan Tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

Definisi ini, tidak jauh berbeda dari Pendidikan Tinggi Islam. Mutu Pendidikan Tinggi Islam yakni kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stakeholder dan pemenuhan janji yang telah diberikan[32]. Setiap Perguruan Tinggi mempunyai standar-standar dan mempunyai janji-janji masa depan yang diberikan kepada *stakeholder*, yang salah satu *stakeholder* Pendidikan Tinggi adalah Mahasiswa[33]. Oleh karenanya, PTAI akan dikatakan bemutu apabila punya tiga kreteria diatas.

Untuk mewujudkan mutu Pendidikan Tinggi –termasuk Islam– didalamnya harus dilaksanakan beberapa langkah-langkah atau prosedur yang sudah digariskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19, Kreteria BAN–PT, ISO 9001: *Malcom Badrige*. Selain itu, kalaupun sudah memenuhi kreteria itu, Pendidikan Tinggi juga mesti mengembangkannya hingga mempunyai strategi *competitiveness* skala internasional sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2005 tentang Internasionalisasi Pendidikan Tinggi.

Dari pandangan ini semua, perlu kiranya untuk menjabarkan keseluruhan prosedur itu dalam satu bahasan unsur-unsur mutu pendidikan. Sebagaimana disebutkan oleh Bedjo Suyanto apabila sekolah sudah menentukan pijakan manajemen kepada Manajemen Berbasis Mutu (*total quality management*). Maka perlu diperhatikan lima hal dalam proses manajerialnya. *Pertama,* input, baik Guru, Karyawan dan Muridnya. *Kedua*

---

[32] Sambutan Amin Abdullah, Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga
[33] Muahaimin *ibid* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kualitas proses. *Ketiga*, kualitas pelayanan. *Keempat,* kualitas *product* (*out put*), dan kualitas *out come*[34].

2. Unsur-Unsur Mutu

Kalau didalam manajemen berbasis sekolah disebutkan ada lima (5) hal diatas, maka didalam Manajemen Perguruan Tinggi rupanya dapat disimpelkan menjadi tiga hal saja untuk mengelola Perguruan Tinggi[35], adapun unsur-unsur mutu[36] adalah sebagai berikut :

a. Input

1) Mahasiswa, Dosen dan Staf Administrasi

Untuk mendapatkan kualitas *input* mahasiswa, Perguruan Tinggi biasanya menyeleksi calon mahasiswanya melalui tes masuk, baik yang dilaksanakan oleh Negara (SMPTN), ataupun oleh lembaga Pendidikan Tinggi sendiri. Dalam kaitannya mutu *input,* mahasiswa sebenarnya tidak ditemukan standarisasi khusus *input* mahasiswa. Pasalanya, mahasiswa yang masuk adalah eks siswa-siswa yang generalis, Sekolah Menengah Atas atau sederajat mengajarkan kompetensi yang hampir sama. Selain itu, penilaian terhadap calon mahasiswa diperlakukan ujian skala nasional, yang hanya berisikan terhadap tiga atau empat mata pelajaran saja.

---

[34] Bedjo Suyanto, *manajemen Pendidikan berbasis sekolah,Model pengelolaan sekolah di era otonomi daerah* (Jakarta : Sagung Seto, 2007)

[35] Dr. Taiduhu Ndraha, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), 70

[36] Unsur-unsur ini juga bisa ditemukan di BAN PT, PP Tentang PT, dan ISO. Dirjen Dikti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam pelaksanaannya Perguruan Tinggi tetap saja memberlakukan sistem seleksi masuk menggunakan tes-tes kompetensi umum yang ada. Di dalam Perguruan Tinggi Islam misalnya, hanya ada lima komponen seleksi yang dilaksanakan. *Pertama,* Pengetahuan Pedidikan Agama Islam (PAI). *Kedua,* Kebahasaan (Arab dan Inggris). *Ketiga,* Pengetahuan Umum (Matematika, Sejarah, dll). *Keempat,* baca tulis Al-Qur'an. *Kelima,* Psiko Tes (tes wawancara).

Secara kualitas, *input* Perguruan Tinggi Umum dan Agama Islam memang berbeda, dan harapan-harapan yang ditumbuhkan juga berbeda. Hal ini biasanya disebabkan oleh latar belakang pendidikan, status social-ekonomi, dan geografisnya. Di IAIN, -yang masih belum mempunyai jurusan atau prodi umum– disebutkan mayoritas *input*-nya berasal dari MA, SMA atau SMU, yang berbasiskan di Pondok Pesantren, atau swasta yang didirikan oleh Organisasi Islam. Selain itu, secara ekonomi *input* IAIN berasal dari keluarga menengah kebawah. Tidak sedikit mereka merupakan elemen masyarakat terbawah (kultural) yang ada di pelosok desa.

Terlepas dari itu semua, Perguruan Tinggi mempunyai standar masing-masing. Mekanisme masukan yang berbeda bahkan dengan *cost* yang berbeda-beda pula. Namun, semua mahasiswanya menaruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harapan akan kualitas-kualitas yang ditemukan masing-masing Perguruan Tinggi tersebut.

Semuanya sepakat, bahwa kualitas dosen merupakan hal paling urgen dalam proses pembelajaran mahasiswanya. Timbulnya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan bukti bahwa dosen mesti punya keseragaman dalam malaksanakan tugasnya. Dosen adalah panutan mahasiswanya, ada pepatah kuno yakni, "*jika guru kencing berdiri maka murid akan kencing belari*"

Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kualitas dosen diukur melalui beberapa kompetensi, ada kompetensi pribadi, sosial maupun kompetensi pedagogik[37]. Dalam benak mahasiswa, Dosen yang ideal adalah :

a) Kompetensi keilmuan, seorang dosen yang baik adalah mereka yang mampu mengajarkan materinya melalui konsep keilmuan yang matang, tidak setangah-setengah, atau bahkan masih sama-sama belajar bersama mahasiswanya. Kualitas dosen ini cukup signifikan dalam kompetensi muridnya. Dosen-dosen lulusan luar negeri biasanya lebih *enjoy*, ketimbang mereka yang agak konservatif.

b) Penguasaan metode belajar, mungkin metode pengajaran dosen tidaklah sama dengan guru, mayoritas dosen selalu

[37] Undang-undang Guru dan Dosen.www.depag.ri.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan proses pembelajarannya kepada mahasiswa dalam bentuk tugas ataupun diskusi. Namun, itulah mungkin cara terbaik untuk mahasiswa karena bukan pola dan bentuk indoktrinasi keilmuan yang *absolute*. Metode pengajaran sangatlah banyak, sehingga untuk meningkatkan kualitasnya, dosen harus bisa mengoptimalkan sarana-sarana pembelajaran yang dimiliki oleh PT. Misalnya, LCD, LAB, dan sarana-sarana lainnya.

c) Pengendalian emosi, mahasiswa menyatakan dosen yang ideal adalah dosen yang tidak emosional.

d) Disiplin, inilah nilai-nilai paling penting untuk memberikan suri tauladan kepada mahasiswanya[38].

Seyogyanya, melalui kreteria dosen ideal yang disebutkan di atas, kualitas dosen bisa dilaksanakan tidak melulu demi mengejar target sertifikasi atau akreditasi jabatan, melainkan ada upaya-upaya pengikutsertaan dosen pada proses pelatihan-pelatihan pengembangan pengajaran, *work shop* dan lain sebagainya.

Selain dosen, yang tidak kalah pentingnya adalah seleksi staf administrasi. Staf administrasi di birokrasi pendidikan hampir serupa dengan kebiasaan staf administrasi pemerintahan. Tidak sedikit, para

---

[38] Prof. Bukhori Alma, "Pemasaran Jasa Pendidikan yang focus pada mutu" dalam *Manajemen Corporate dan Strategi pemasaran jasa pendidikan.* Ibid. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

staf hanya punya tugas tahunan. Budaya organisasi yang terbangun di birokrasi sangat jauh dari kebiasaan budaya organisasi perusahaan.

Ciri khas staf organisasi kampus terkenal galak dan tidak mendahulukan kebutuhan konsumen. Terkadang di dalam birokrasi akademik juga terlihat betapa pihak karyawan yang tidak sibuk mengerjakan tugas, melainkan mengobrol, menggosip dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan birokrasi bersifat tahunan atau setengah tahunan saja. Mestinya, dalam meningkatkan mutu staf, standar minimalnya adalah menggunakan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Santun, proses yang cepat, data yang tidak cepat hilang dan lain sebagainya.

Standar kualifikasi dan kinerja biasanya diberlakukan di dalam birokrasi, namun sepertinya merupakan formalitas saja untuk memenuhi laporan pertanggung jawaban saja. Dengan ini, *input* dosen berkualitas adalah dosen yang mampu mengajarkan pelajarannya dengan baik, punya standar kompetensi di atas rata-rata mahasiswanya. Sedangkan staf administrasi yang baik dan berkualitas adalah staf yang mendahulukan kepentingan pelanggan (*customer oriented*)

2). Keuangan, Sarana-Prasana dan Informasi

Dalam upaya peningkatan (*developing*) kualitas, ada terminologi *cost of quality* (harga dari sebuah kualitas). *Cost* pada kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari mungkin bisa dikategorikan sebagai keuangan. Sedangkan pada proses pengelolaan keuangan, di buku tentang *Total Quality Management* (TQM) disebutkan bahwa pengalokasian dana yang berkualitas adalah ketepatan (*effective cost*) dan keselarasaannya (*efficient cost*)[39]. Maka dari itu, diutuhkan suatu perencanaan dalam proses pendapatan keuangan dan pengelolaan keuangan.

Kaitan dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu keuangannya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

a) Mengindentifikasi secara terperinci mengenai siapa yang akan men-*suply* dana.
b) Pratik-praktik apa saja yang dapat dikembangkan oleh universitas dalam upaya memasukkan prisnsip perekonomian terhadap dunia kampus.
c) Keteredian SDM dan Fasilitas dalam pengadaan perekonimian kampus.
d) Kepada siapa saja praktik-praktik ini akan dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.[40]

Prinsip-prinsip di atas, mengarahkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan poin penting dalam proses pengelolaan keuangan. Sebagai contohnya, di Melbourne University,

---

[39] Buchori Alma.....23

[40]Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 127-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam upaya untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi keungannya, pihak pengelola mengadakan survey *umpan-balik*, survey ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilatas dan tepat atau tidaknya sasaran keungan yang sudah dilaksanakan[41]. Pada survey tersebut berisikan tentang :

a) Survey mahasiswa tentang mutu pengajaran dan fasilitas penunjang .
b) Survey staf tentang mutu manajemen dan administrasi.
c) Survey alumni.
d) Survey *employer* tentang persepsi lulusan.
e) Survey *research student* tentang supervisi dan a*cademic resource*.

Seluruh survey ini dilaksanakan karena presentase keungaan lembaga Pendidikan Tinggi biasanya dialokasikan di program-program tersebut. Sehingga dengan survey ini ada *progress report* yang akurat tentang umpan balik mutualisme dari anggaran yang banyak dan pencapaian yang diinginkan. Menurut pandangan salah seorang Kepala Sekolah Teladan Nasional di Surabaya menyebutkan bahwa : Lembaga Pendidikan butuh *income* banyak, melalui *income* banyak maka akan melaksanakan kegiatan yang banyak juga, kalau

[41] Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Mutu Terpadu; Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak kegitan maka kita akan dapat prestasi, kalau banyak prestasi lulusannya pasti akan bagus[42].

Dengan demikian, untuk mengelola keuangan selain dibutuhkan kelihaian memperolah *resource* keunganan juga dibutuhkan mutu pencapaian dari keuangan (*cost*) yang sudah dialokasikan kepada sasaran kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

Sarana pendidikan adalah salah satu bagian terpenting dalam peningkatan mutu. Pastinya, kualitas sarana prasarana yang dimaksudkan bukanlah merk dari sebuah barang. Melainkan suatu kelengkapan yang dibutuhkan di dalam sebuah proses Pendidikan Tinggi tersebut.

Universitas, Insitut atau Sekolah Tinggi membutuhkah gedung untuk kelas yang kondusif, perpustakaan lengkap bahan bukunya, laboratorium untuk praktikum dan sarana-sarana lainnya. Kualitas sarana pada sebuah lembaga Pendidikan Tinggi dapat diukur menggunakan instrumen, *pertama* kelengkapannya terhadap seluruh kebutuhan civitas akademikanya dan mahasiswa. *Kedua,* aksestabilitas untuk mendapatkan dan memanfaatkan sarana-sarana yang sudah ada. *Ketiga,* daya tampung sarana, *Keempat,* inventarisir dan perawatan sarana (barang).

---

[42] Wawancara dengan Bapak Sholihin, Kep. Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya yang berpredikat sekolah teladan nasional menurut LIPI. 1. Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Pendidikan Tinggi membutuhkan sistem informasi yang bagus, Ilmu Teknologi dan Informasi sangat dibutuhkan, upaya memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, kualitas informasi biasanya berkaitan pada seluruh cakupan keberadaan yang ada di Lembaga Tinggi.

Sebut saja, misalnya melalui *website*, semua informasi yang dibutuhkan oleh internal ataupun eksternal kampus bisa dipenuhi dengan baik. *Data base* informasi seyogyanya mencakup pada :

a) Profil Lembaga
b) Data Base Mahasiswa dan Perkembangannya
c) Data Base Program
d) Data Base Kinerja Dosen dan Staf
e) Informasi-informasi Pengembangan dan Perkembangan Perguruan Tinggi.
f) Berita-berita lain yang dianggap dibutuhkan oleh seluruh elemen Perguran Tinggi.

Dari semua yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *input* Peguruan Tinggi merupakan elemen awal untuk memudahkan perihal kegiatan selanjutnya. Kalau perguruan tinggi sudah memberlakukan suatu sistem *input* yang bagus, maka program-program yang akan dilaksanakan akan didukung oleh mahasiswa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkualitas, dosen yang bagus, sarana prasana yang lengkap, dan sistem informasi yang disajikan oleh staf yang berkompeten.

Sehingga dengan ini, *input* merupakan satu pijakan awal untuk menentukan suatu kebijakan prosedur proses. *Input* yang bagus tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa suatu proses yang juga menunjang untuk itu, dalam peningkatan kuliatas pendidikan dibutuhkan *balancing* dari tiga elemen (*input*, proses, dan *out put*).

b. Proses

1) Prodi dan Kurikulum

H.A.R Tilaar menyebutkan di suatu artikelnya, "*Pengembangan Pendidikan Tinggi untuk Membangun Indonesia Baru*". Bahwa melalui TAP MPR–RI No. VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat yang relegius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelengagraan negara[43]. Dan juga sebagaimana disebutkkan oleh A. Qudri Azizi, Pergutuan Tinggi semestinya menjadi bentuk *solving* dari sebagian permasalahan negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan mewujudkan indonesia menjadi negara maju yang diidam-idamkan[44].

---

[43] Dimuat di Buku 60 Tahun Ir. Jonathan Parapak, M. Eng. H.AR. Tilaar Kekuasaan dan Pendidikan.*Ibid* 229.

[44] A. Qodry Azizi mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN. dalam *Problem dan Prospek IAIN ,Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, DEPAG RI, 2000. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua pandangan umum diatas, mestinya perguruan tinggi benar-benar bisa mengambil tempat penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan negara. Melalu TAP MPR tahun 2001 Perguruan Tinggi Islam mempunyai prospek Khusus untuk mengajarkan masyarakat yang relegius namun berpengetahuan global.

Di dalam Perguruan Tinggi minimal ada dua aspek pengembangan program studi. *Pertama* pengembangan program studi untuk menumbuhkan intelectualitas (*natural science*) *kedua*, adalah pengembbangan relevanasi program studi pada aspek untuk membantu pengembangan perekonomian dan pengabdian kemasyarakatan (*humanities science*)[45].

Dua poros prodi ini tidak terlepas dari tugas Perguruan Tinggi, yang *pertama* sebagai pusat peradaban. Bagaimanapun wujud perguruan tinggi menjadi *central of culture*, fakultas sastra dan fakultas keilmuan agama merupakan wujud eksistensinya. Kedua, sebagai reproduksi sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjadi induk pembangunan nasional. Hal ini dibentuk melalui jurusan atau fakultas yang mengarah kepada pembangunan perekonomian, sosial dan pengabadian kemasyarakatan. *Ketiga,* Perguruan Tinggi sebagai *public research,* yakni wujud pusat

[45] A.Qodary Azizi. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kecendrungan serta keinginan masyarakat indonesia pada umumnya.

Dalam proses pengadaan prodi di beberapa perguruan tinggi kecuali yang berbentuk akademi, membentuk prodi-prodi dengan menggunakan paradigma. Oleh karenanya, tidak mungkin sebuah Universitas ataupun Institut menanggalkan tugasnya begitu saja. Namun, pada saat ini, yang menjadi problematika adalah bagaimanakah kurikulum yang dikembangkan untuk menggapai tugasnya?

Sutikno, sebagaimana dikutip H.A.R Tilaar, menyebutkan dari sekian proses yang ada di peguruan tinggi kurikulum faktor paling penting untuk menjadikan SDM yang berkualitas. Kurikulum merupakan *blue print* yang mesti dilaksanakan. Pengembangan kurikulum di Perguruan Tingi secara kebiasaan hasil copian dari kebanyakan perguruan tinggi lainnya. Kualitas kurikulumnya sangat jarang mengarahkan mahasiswa kepada satu bentuk *out put* yang diinginkan[46].

Padahal, Perguruan Tinggi mempunyai sistem kurikulum yang lebih desentralistik, dan setiap perguruan Tinggi mempunyai cara yang berbeda-beda sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. Oleh

---

[46] Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, upanya peningkatan prodi harus juga bisa mengarahkan kurikulumnya. Tidak sedikit, jurusan atau prodi yang menjadi minat mahasiswa namun muatan kurikulumnya tidak mendunia. Semestinya, Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local[47].

Di Indonesia, ada banyak tawaran kurikulum baru yang mesti dilaksanakan - menurut pandangan beberapa tokoh - perlu dimasukkan dalam upaya pengembangan kualitas Perguruan Tinggi, misalnya saja, interpreneurship, Kurikulum Anti Korupsi, Kajian Gender atau Kurikulum Kearifal Lokal (kedaerahan).

Semuanya mungkin penting untuk dipertimbangkan. Kepala Prodi atau top manajer lainnya mempunyai hak untuk melaksanakan beberapa kurikulum itu. Pasalnya, itulah yang pada saat ini dibutuhkan oleh negara dalam upaya menggapai tujuan pendidikan nasional.

2) Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar

Ahmad Sanusi (1990 : 1) menyebutkan bahwa untuk melihat mutu akademik (muara dari proses pendidikan manusia, alat, kurikulum dan fasilitas) dapat diteliti dengan tiga dimensi yaitu : mutu hasil belajar, mutu mengajar dan mutu bahan kajian dan pelajaran. Mutu hasil belajar yang dimaksud adalah produktivitas yang

[47] Aam, *Penjaminan...*, http://www.kopertis.or.id.E-mail:kopwil4@bdg.centrin.net.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan dari proses belajar mengajar. Contohnya, terlahirnya paradigma baru yang timbul dari kajian-kajian yang dilaksanakan dari pembelajaran. Instrumen mutu belajar ialah rational dan rationable. Artinya, nilai-nilai ilmiah yang dikaji dan didiskusikan mempunyai cara pandang baru dalam pendidikan, tidaklah staknan dan berdasarkan pada buku yang satu[48].

Demensi mutu mengajar (dosen) sangatlah memberikan sumbangsih signifikan bagi mahasiswanya. Faktanya terjadi perbedaan mencolok antar Dosen yang konservatif dan modern. Dalam proses mengajar Dosen yang konservatif hanya mengandalkan dialog-dialog biasa tanpa memberikan satu bahan baru. Sedangkan bagi Dosen modern lebih partisipatif dan menerima masukan dari mahasiswanya. Jadi, Ahmad Sanusi mempunyai kesimpulan latar belakang, kemampuan pedagogis dan performance seorang pengajar sangatlah menentukan tentang mutu mengajar yang akan dilaksanakannya.

Dimensi ketiga, bahan kajian dan pelajaran. Mutu bahan kajian dan pelajaran biasanya berada di Perpustakaan dan hasil penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Kekayaan bahan ajar sangat menentukan kelebihan intelektualitas peserta didik dan gurunya. Sebaliknya, bahan ajar yang sedikit bisa mengakibatkan kemampuan intelektual yang juga minim dan itu-itu saja

[48] Ahmad Sanusi, *Profesionalisasi Manajemen Pendidikan* (IKIP : Bandung, 1994),57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sistem Manajemen

Berkembangnya pengetahuan tentang manajemen, rupanya juga merasuk pada proses pengembangan pendidikan di Indonesia. tuntutan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai satu bentuk organisasi yang berbasiskan pada produk ekonomi dan bisnis itupun tidak terelakkan. Oleh karenanya, mayoritas perguruan tinggi memberi predikat kegiatan organisisasinya pada istilah-istilah yang sebenarnya dikenal di dunia bisnis.

Di dalam beberapa literatur disebutkan dalam upaya meningkatkan mutu sistem manajemen perguruan Tinggi diperlukan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Meningkatkan otonomi manajemen, dengan harapan kreativitas, keaslian dan produktivitas civitas akademika bisa berkembang, baik secara fisik, finansial dan sumberdaya manusia termasuk kurikulumnya.
b) Kerjasama dengan masyarakat tentang pemberdayaan human kapital yang dimiliki oleh Pendidikan tinggi
c) Menyusun sistem Akreditasi dan kualitas kinerja Staff atau pengelola pendidikan tinggi
d) Menyusun peraturan dan perundang-undangan untuk memberikan proses kenaikan pangkat atau pemberian gelar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Meningkatkan Evaluasi civitas akademika dalam proses pengajaran, pengelolaan dan kinerja staff.

Menjadikan Perguruan Tinggi yang birokratis menjadi sistem manajemen bisnis (koorporat) bukanlah hal yang mudah. Kebiasaan dan sistem *reward* and *punishment* yang berbeda menjadi titik tumpu awal. Rhenald Kasali menyebutkan bahwa kelemahan lembaga pendidikan tinggi dikarenakan mempunyai sistem nilai kebudayaan yang terkungkung pada peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang harus disahkan melalui birokrasi di atasnya. Oleh karenanya, terkadang kreatifitas dan keaslian lembaga terkubur diakibutkan sebuh aturan.

Namun, memasukkan perkembangan diskursus manajemen dalam dunia pendidikan bukanlah nihilisme, dengan diberlakukannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) akan membentuk perguruan tinggi yang di demokratisasikan dan di otonomikan sistem manajemennya. Oleh sebab itu, Perguruan Tinggi juga diharapkan bisa mengadaptasikan sistem yang baru ini dalam pendidikan Tinggi.

c. Out put

Diskursus tentang *out put* pendidikan Tinggi Sangat luas, ada banyak kaitan erat antara proses dan kebijakan yang dilaksanakan oleh perguruan Tinggi dan Aktifitas out put yang dikeluarkan baik berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

human capital (lulusan/alumnus), Kebijakan /program dan pelayanan (*out put of proces)* Pengabdian Masyarakat dan Penelitian (*social control and research*).

Secara garis besar, dalam proses peningkatan mutu *out put* perguruan tinggi dibutuhkan relevansi-relevansi melalui analisa *need assisment* yang selalu dilakukan untuk diberlakukan serta dilaksanakan didalam pengembangannya. Oleh karenanya, mungkin untuk lebih jelasnya akan dibahas kaitan erat proses pembuatan kebijakan dan kualitas out put didalam bab selanjutnya.

3. Pelembagaan Mutu Pendidikan Tinggi

Pada dasarnya Perlembagaan Mutu Pendidikan Tinggi ini adalah satu peristilahan dan kajian tersendiri. Namun, hanya untuk diketahui, bahwa perguruan Tinggi sudah melaksanakan audit internal tentang proses pengembangan manajemen berbasis mutu (TQM). Pada skala nasional, ada Badan Akreditasi Nasional, pada Universitas ada KPM, dan sampai seterusnya.

Secara konsep bentuk-bentuk kelembagaan tersebut menurut Dr. Dr. Agus Rahayu terbagi menjadi 2 lembaga :

a. Penjamin Mutu

Menurut Suparlan Penjaminan Mutu adalah perbuatan menjamin kualitas yang lebih menekankan pada masalah prosesnya.[48] Dalam artian melaksanakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan

[48] Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta; Hikayat, 2005), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Rinda Hedwig menambahkan dalam bukunya model sistem penjaminan mutu dan proses penerapannya di perguruan tinggi bahwasanya dalam melaksanakan proses penjaminan pendidikan dibutuhkan faktor sebagai berikut : (1) pembagian manfaat pendidikan tersebut kepada masyarakat maupun untuk alumnus, (2) sistem swadaya dan swasembada yang mulai diberlakukan diperguruan tinggi, (3) efisiensi tanpa mengurangi aktifitas serta produktifitas lembaga, (4) penekanan pada kepuasan *stakeholder* (mahasiswa, dosen, alumni, pengguna lulusan, orang tua dan pemerintah), (5) pemusatan kepada belajar dan bukan mengajar (*learning centered education*), (6) penekanan bahwa pendidikan ini adalah hal dinamis yang senantiasa berubah berdasarkan perkembangan yang terjadi, (7) pendidikan yang ada saat ini sebaiknya relevan dengan kebutuhan masyarakat, negara dan dunia, (8) tanggung jawab pendidikan bukan hanya menjadi milik pendidikan melainkan harus sama-sama dilakukan oleh si pendidik dan mahasiswa, (9) pemberdayaan dalam pendidikan merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.[49]

Dengan demikian langkah-langkah penjaminan mutu sebagai usaha menjaminkan dam meningkatkan mutu perguruan tinggi sangat diperlukan, dalam hal ini terdapat beberapa langkah dalam melaksanakan penjaminan mutu,

---

[49] Rinda Hedwing, *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi : Monitoring dan Evaluasi Internal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah: (1) penetapan standar (2) pelaksanaan dan monitoring (3) evaluasi diri dan evaluasi kolega eksternal (audit internal) (4) peningkatan mutu dan *benchmarking*.

b. Pengendalian Mutu

Perguruan Tinggi dituntut untuk melakukan perbaikan mutu, melalui penjaminan mutu yang dijelaskan diatas, pastinya dibutuhkan satu bentuk pengendalian mutu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan mutu yang sudah diprogramkan terganggu oleh kebiasaan-kebiasaan lainnya yang bisa mengubah kembali kepada prospek awal keberadaan Perguruan Tinggi.

Dalam pengendalian mutu dikenal beberapa proses sebagai berikut :

1) *Priliminary Control*, kegiatan ini bersifat preventif untuk menghidari mutu yang tidak diinginkan dan proaktif untuk mencapai mutu yang diinginkan.
2) *Concurrent Control,* dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan menggambarkan pengendalian operasional.
3) *Rework Control,* hal ini dilaksanakan apabila dua hal diatas mengalami kegagalan dalam prosesnya, istilah ini bisa dikategorikan sebagai perbaikan mutu di tengah jalan menggunakan alternatif kegiatan yang lain.
4) *Demage Control,* dilakukan untuk meminimalkan dampak negative dari tidak tercapainya target nilai bagi *stakeholder*. Hal ini Fokus pada komponen dari keberadaan stakeholder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya, pengendalian mutu mempunyai prinsip sebagai berikut : (1) Quality First, (2) Stakeholder in, (3) The Next Proces is our stakeholders, (4) Speak With data, (5) Upstream Management. Pada proses pengendalian mutu dikenal pula istilah PDCA (plan, Do, Ceck, Action). Memprogram seluruh mutu menggunakan proses penjaminan mutu, dilaksnakan dalam melalui kegiatan-kegiatan, diperbaiki diperjalanan program dan melaksanakan kegiatan alternatif lainnya apabila terdapat kegagalan suatu progam.

D. KEBIJAKAN DAN PENINGKATAN MUTU LULUSAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Bahasan ini tetap berpijak pada landasan teoritik secara global dalam pandangan-pandangan praktisi Pendidikan Tinggi islam. Identifikasi problematika Lulusan perguruan tinggi islam memang sudah menjadi perbicangan umum, sehingga bentuk kebijakan-kebijakannya pun sudah ditentukan pada zamannya.

Pada tahun 1998-an, pasca rezim orde baru mulai tergoncang, pendidikan tinggi islam mulai menemukan ladang bahasannya. Karena, saat itu terjadi konflik yang sulit terselesaikan antar umat beragama, gereja dibakar, kaum minoritas ditindak dan umat islampun terpecah belah menjadi berbagai golongan. Sehingga, Perguruan Tinggi Islam saat itu menjadi prioritas pendidikan agama yang toleran dan dianggap bisa menyesaikan permasalahan tersebut[50].

---

[50]. Komarudin Hidayat, dinamika pemikiran islam di Perguruan Tinggi, (Logos : Jakarta, 1999),xvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca kejadian itupun timbul tokoh-tokoh cendikiawan muslim – pembaharu pemikiran islam – sebut saja, Bahtiar Effendy, Nur Cholis Masjid, Azzumardi Azra dan masih banyak alumni Perguruan Tinggi Islam lainnya yang menjadi pedoman keislaman baru di Indonesia ini. Sehingga berbicara lulusan Perguruan Tinggi Islam pada saat itu, merupakan sebuah kebanggaan karean secara tidak langsung lulusan Perguruan Tinggi Islam mampu berfungsi dikehidupan nyata sebagai penyuluh idea-idea tentang keislaman.

Namun, setelah Demokrasi dibuka lebar-lebar. Integritas dan stabilitas negara indonesia kembali pulih, pikiran warga negara indonesia mulai lupa tentang wajah keberagamaannya. Mereka sudah mulai berfikir pragmatis lagi, menginginkan perguruan Tinggi yang bisa mengantarkannya pada dunia nyata (pekerjaan). Oleh karenanya, pendidikan Tinggi Islam dituntut untuk mengikuti *trend* yang berkembang agar tidak terlindas zaman. Pada kali ini, akan disebutkan sebuah problematika-problematika yang timbul pasca masa keemasan – kalau boleh dibilang begitu – dalam poros pendidikan Tinggi Islam, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah pernah dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan permasalahannya.

1. Problematika dan Karakter Lulusan Pendidikan Tinggi Islam

Untuk memulai pembahasan ini, ada cuplikan menarik yang ditulis oleh Ahmad Minhadji dan Komaruzzaman :

> Sejauh ini, ada semacam kritik lulusan PTAI belum memiliki satu kaeahlian yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, peninjauan ulang terhadap pembidangan ilmu di lembaga perguruan tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angama menjadi mutlak diperlukan. Paling tidak, peninjauan ini diharapkan memberikan arah dan tujuan dalam mencetak para sarjana Islam.[51]

Cuplikan ini, menyebutkan bahwa masyarakat sudah tidak begitu peduli tentang keagamaan mereka pada saat ini, kebutuhan tentang penyuluh keagamaan lebih diprioritaskan kepada lulusan pondok pesantren. Karena mereka menganggap Pergurua Tinggi Islam sebagai ladang sekolah formal milik pemerintah, sedangkan Pesantren adalah milik masyarakat yang dikelola oleh orang suci (kiai).

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ridwan Lubis :

> Lulusan IAIN menghadapi persoalan yang cukup serius yaitu sulitnya memenuhi dua kualifikasi para ulama lulusan pondok pesantren sebagaimana yang dukemukakan di atas, yaitu profesionalitas dan jati diri. Mereka belum memeliki keterampilan untuk menggunakan ilmunya sebagai sumber penghidupan kecuali apabila sumber penghidupan itu dibatasi pada kegiatan ceramah, tablig, pengajian dan sebagainya. Dan juga terdapat mengembangan yang cukup menarik bahwa para lulusan IAIN yang giat di lapangan mimbar umumnya bukan berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Dakwah ataupun Ushuluddin tapi justeru Syari'ah. Ketidakberhasilan mereka, mengembangkan profesi keilmuan ini agaknya tidak dapat dipikulkan keaslahan itu kepada generasi masa kini tetapi harus diruntut pada akar sejarah perkembangan ilmu-ilmu agama di Indonesia. Ilmu-ilmu agama Islam di Indonesia tampaknya disiapkan untuk memberikan jawaban kepada nuansa kehidupan yang menekankan kepada pengayaan kerohanian (spiritual enrichement) yang diwarisi bangsa ini kultur Hindu dan Budha.[52]

---

[51]Untuk hal ini, lihat Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam HIstoris: Dinamika Studi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), dan lihat Prof. Drs. AKH. Minjahi, MA., Ph.D. dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz) 38

[52]Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis, "Relevansi Pengembangan Ilmu-ilmu dengan Dunia Kerja di Era Globalisasi" dalam *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998) 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mereka yang tidak bisa bersaing ladang pekerjaan dalam kancah keagamaan dengan masyarakat pondok pesantren. Lulusan Perguruan Tinggi Islam juga mengalami permasalahan pengabdian keilmuannya di dalam masyarakat. Dari sekian banyak program studi yang ditawarkan di Perguruan Tinggi islam, hanya sebagian saja yang mampu berkompetisi dengan lulusan Perguruan Tinggi Umum, di bidang Advokasi Hukum (syariah), Keguruan (tarbiyah). Dua program studi inilah yang sudah mempunyai nilai profesi dimasyarakat sehingga bisa bersaing dengan lulusan lainnya, dan mempunyai lapangan pekerjaan yang berbeda pula.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Sutikno seorang Dosen Tarbiyah, profesi yang digeluti oleh lulusan perguruan Tinggi Islam pada tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Status Kerja Responden[54]

(jumlah responden 1677)

No	Status Kerja	Frekuensi	Persen
1.	Tidak Kerja	432 orang	25,76
2.	Melanjutkan Kuliah	12 orang	0,71
3.	Kuliah Sambil Kerja	33 orang	1,96
4.	Bekerja	1181 orang	70,42
5.	Tidak Menjawab	19 orang	1,15
	Total	1677	100

Tabel 2 : Status lulusan IAIN

[54]Sutikno. NIZAMIA Vol. 3, No. 6, Juli-Desember 2000. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3 : Bidang Pekerjaan Alumni IAIN[55]

No	Status Kerja	Frekuensi	Persen
1.	Pendidikan	760	77,3
2.	Keagamaan	534	47,6
3.	Perdagangan	122	10,9
4.	Administrasi	97	8,6
5.	Hukum	53	4,7
6.	Informasi	50	4,5
7.	Kebudayaan/Kesenian	41	3,7
8.	Pertanian	37	3,3
9.	Lingikungan	32	2,9
10.	Kesehatan	29	2,6
11.	Keuangan	29	2,6
12.	Komputer/Elektronik	15	1,3
13.	Konstruksi	11	1,0
14.	Otomotif	9	0,8
15.	Perbankan	8	0,7
16.	Lainnya	67	6,0

Mayoritas pada saat itu, disebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi islam (UIN, IAIN, STAIN dan Lain sebagainya) menjadi Guru, ini menunjukkan aspek keilmuan mereka lebih dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui istitusi pendidikan tidak keluar dari jalur yang biasanya dan hanya sedikit saja mereka bekerja di luar bidang pengabdian keilmuannya.

Selain yang disebutkan di atas, kecendrungan Lulusan Perguruan Tinggi islam berkecimpung dalam Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) salah satunya apa yang disebutkan oleh Fahri Aly, yang menyebutkan bahwa lulusan IAIN pada saat itu banyak membuat LSM-LSM yang berafisiliasi

[55]Sutikno. NIZAMIA Vol. 3, No. 6, Juli-Desember 2000. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap keagamaan dan pengembangan kemasyarakatan. Sebut saja LP3ES, Madzhab Ciputat, Penerbit Paramadina dan Lain sebagainya[55]

Dari beberapa pemaparan diatas, untuk mengidentifikasi kualitas lulusan sebenarnya tidak hanya pada aspek pekerja apa yang didapatkan pasca mereka melaksanakan studinya namun juga pada aksestabilitas kelanjutan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya ada empat kategori permasalaha yang didapatkan oleh perguruan Tinggi dalam mengelola lulusannya :

Termasuk dalam *kelompok permasalahan pertama:* dorongan melanjutkan studi di pendidikan tinggi, baik terhadap mahasiswa maupun terhadap lulusan; peranan informasi kareir awal terhadap dorongan masuk ke pendidikan tinggi tersebut; dan harapan ingin menjadi seorang ahli dalam satu bidang tertentu pada waktu menyelesaikan studi di SLA.

Termasuk pada *kelompok permasalahan kedua:* mobilitas studi di pendidikan tinggi, baik dipihak mahasiswa maupun di pihak lulusan; dan derajat kesenangan ataupun kepuasan terhadap penampilan pendidikan tinggi, baik menurut pandanngan mahasiswa, lulusan ataupun pengguna lulusan.

Termasuk dalam *kelompok permasalahan ketiga:* harapan untuk bekerja pada sektor tertentu setelah menyelesaikan studi di pendidikan tinggi, terutama di pihak mahasiswa; pandangan tentang cara yang harus ditempuh

---

[55]Fachry Ali, "Kotinuitas dan Perubahan: Catatan Sejarah Sosial Budaya Alumni IAIN" dalam *Problem dan Prospek IAIN ,Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, DEPAG RI, 2000. 387-388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang pekerjaan; kesediaan bekerja diadaerah pedesaan, baik di pihak mahasiswa maupun di pihak lulusan; pandangan tentang cara ynang harus ditempuh untuk mendapatkan pekerjaan pertama; harapan mendapatkan pekerjaan yang pantas setelah menyelesaikan studi di pendidikan tinggi ; dan cara merekrut karyawan lulusan perguruan tinggi oleh para pimpinan perusahaan.

Termasuk dalam *kelompok permasalahan keempat:* pandangan tentang sejumlah faktor yang dianggap dapat memebrikan kepuasan kerja maupun peningkatan karier karyawan, baik oleh mahasiswa, lulusan maupun pengguna lulusan; dan kesediaan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, baik oleh lulusan maupun oleh pengguna lulusan.

Dari pengidentfikasian yang ada sinergitas antara Perguruan Tinggi Islam dan harapan mahasiswanya. Kalau boleh dikategorikan harapan mahasiswa dan apa yang semestinya dilakukan oleh institusi perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut :

a. Mahasiswa yang sudah lulus membutuhkan aksestabilitas dalam melanjutkan studinya, atau kemudahan informasi tentang lowongan pekerjaanya. Sedangkan Perguruan Tinggi adalah penyedia akses tersebut melaui program dan kebijakannya.
b. Mahasiswa membutuhkan keluasan pengetahuan tentang kebutuhan umum dari suatu profesi yang bisa digeluti pasca lulus dari Peguruan Tinggi dan Pengenalan tentang profesinya bisa disosialisasikan lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal agar bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi tenaga kerja yang profesional.

2. **Bentuk-Bentuk Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam**

   a. Kebijakan dari IAIN menjadi UIN, kebijakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperluas akses jaringan mahasiswa Perguruan Tinggi Islam. Bergantinya lembaga dari institut menjadi Universitas diharapkan untuk ditambahnya beberapa pendidikan umum yang lebih mendunia dan ditopang pula dengan pendidikan agama yang *ukhrowi*. Kebijakan ini, sesuai dengan Dirjen DIKTI yang menyebutkan untuk memperluas cakupan perguruan Tinggi Islam sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang relegius dan maju secara intelektualitas.

   b. Kebijakan Peningkatan mutu Innformasi dan Layanan, sebagaimana yang dijelaskan diatas kebijakan ini, untuk bisa memberikan kepuasaan terhadap stakeholder untuk bisa mengakses informasi dan kepuasaan dalam hal pelayanan oleh staffnya.

   c. Kebijakan Relevansi Kurikulum dan pengenalan dunia kerja, dalam hal ini, mungkin hanya beberapa prodi saja yang bisa melaksanakannya, karena kebijakan ini biasanya dilaksanakan berbentuk praktek kerja lapangan, dan dari sebagian prodi yang ada di perguruan tinggi mempunyai akses profesinya[56].

---

[56] Ahmad minhaji dan Komaruzzaman,...23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan-kebijakan di atas, biasanya dilaksanakan melalui proses rapa-rapat yang intensif. Perlu digaris bawahi lagi bahwa ini hanya sebagian contoh saja, secara konseptual lulusan itu bisa ditopang melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dalam setiap lini. Karena pemegang kuasa terting dalam perguruan tinggi islam adalah Rektor dan pembantu Rektor, maka kebijakannya berbentuk satu kebijakan umum baik dari visi, misi dan program yang akan dilaksanakan selama beberapa tahun.

Sedangkan ditingkat fakultas mengimplementasikan formulasi besar sebagai kebijakan petunjuk, selanjutnya diderivasikan kepada kepala prodi (jurusan) untuk dibuat sebuah kebijakan tekhnis. Oleh sebab itu, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat ditabel berikut ini.

Tingkat	**Dokumen**
Perguruan Tinggi	Kebijakan Akademik Standar Akademik Peraturan Akademik Manual Mutu Manual Prosedur
Fakultas	Kebijakan Akademik Standar Akademik Peraturan Akademik Manual Mutu Manual Prosedur
Jurusan/bagian/Program Studi	Spesifikasi Prodi Kompetensi Lulusan Program Pembelajaran (GBPP-SAP)

Tabel 4 : Tingkatan kebijakan di Perguruan Tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. PROFIL LEMBAGA

1. Sekilas Tentang IAIN Sunan Ampel Surabaya

IAIN Sunan Ampel adalah perguruan tinggi Islam Negeri yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20/1965, dan berlokasi di Jalan Jend. A. Yani 117 Surabaya, Jawa Timur. Sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang keenam, IAIN Sunan Ampel menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Berbagai fakta, mulai yang bersifat politis, keagamaan hingga geografis, menegaskan nilai strategis IAIN Sunan Ampel di tengah beragamnya lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Fakta sejarah atas berdirinya IAIN Sunan Ampel menjelaskan posisi strategis yang dimilikinya, menyangkut dimensi politik keagamaan di Jawa Timur pada khususnya. Besarnya jumlah masyarakat muslim Jawa Timur beserta lembaga pendidikan Islam di bawah level perguruan tinggi, termasuk pesantren, mengilhami munculnya gagasan pendirian IAIN Sunan Ampel.

Pada akhir dekade 1950, beberapa tokoh masyarakat muslim Jawa Timur mengajukan gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mereka menyelenggarakan pertemuan di Jombang pada tahun 1961.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertemuan itu, Profesor Soenarjo, Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir sebagai nara sumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya perguruan tinggi agama Islam dimaksud. Dalam sesi akhir pertemuan bersejarah tersebut, forum mengesahkan beberapa keputusan penting yaitu: (1) Membentuk Panitia Pendirian IAIN, (2) Mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya, dan (3) Mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang.

Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1961, dibentuk Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang menyusun rencana kerja sebagai berikut : 1. Mengadakan persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. 2. Menyediakan tanah untuk pembangunan Kampus IAIN seluas (delapan) Hektar yang terletak di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya . 3. Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar. Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964. Berawal dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang dengan pesat. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Namun demikian, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, 5 (lima) dari 18 (delapan belas) fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu, fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki 12 (dua belas) fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 (satu) fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini IAIN Sunan Ampel terkonsentrasi pada 5 (lima) fakultas induk yang semuanya berlokasi di kampus Surabaya. Beberapa fakutas yang bernaung di IAIN Sunan Ampel Surabaya meliputi : Program Pendidikan Strata Satu (sarjana) yang terdiri lima (5) fakultas, PPS S-2 dan S-3 di Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Lima fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Adab, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah[1].

---

[1] Data ini terdapat di Rencana Strategis (RENSTRA) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009-2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi IAIN Sunan Ampel ditetapkan sebagai berikut: "***Menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif***"

Adapun Misi IAIN Sunan Ampel dirumuskan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, yang memiliki keunggulan dan berdaya saing.
b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis religiusitas ke-Islaman[2].

2. **Sejarah Fakultas Adab dan Ushuludin IAIN Sunan Ampel**

a. Fakultas Adab

Fakultas Adab berdiri melalui keputusan Menteri Agama RI No. 57/1966 tanggal 6 September 1966. Fakultas ini akan menghasilkan mahasiswa dengan kompetensi jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, yaitu: Mencetak sarjana yang memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional dalam analisis kesejarahan, baik yang menyangkut sejarah sosial, politik, ekonomi umat Islam baik klasik maupun kontemporer. Sedangkan Kompetensi Lulusan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) yaitu: membentuk sarjana yang ahli dalam menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab, mampu berkomunikasi secara aktif, dan kemampuan profesional sebagai penulis, peneliti.

[2] Data ini dapat diakses melalui *www.iaian-sunanampel.co.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Adabmemiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan inti *Islamic studies* di bidang sastra, bahasa dan budaya. Sastra Islam telah memiliki sejarah sangat panjang. Demikian pula bahasa Arab juga telah menjadi *lingua franca* masyarakat yang beragama Islam dari Timur Tengah ke Afrika Utara, Asia Selatan bahkan Asia Tenggara, dan Eropa Tengah. Banyaknya masyarakat yang menggunakan bahasa Arab tentunya menjadi hal menarik ketika bahasa ini dikaji secara akademik. Kebudayaan Islam juga telah merasuki di banyak kawasan di dunia ini. Budaya kolaboratif di antara berbagai lemen kebudayaan yang berbeda tentunya menjadi bidang kajian yang menarik di era kontemporer.

Sebagai Fakultas yang mengemban fungsi pengkajian sastra, bahasa dan budaya, maka tentunya bisa mengembangkan dirinya ke dalam kajian-kajian yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam komunikasinya di dunia internasional. Di dalam hal ini, maka kajian sastra, bahasa dan budaya dapat didiversifikasikan ke arah bahasa masyarakat lain non-Arab dalam program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tugas bersama untuk mengembangkan program studi berbasis sastra, bahasa dan budaya yang lebih bersearah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di era kontemporer. Melalui diversifikasi program studi ini, maka kecenderungan penurunan minat studi di Fakultas Adabakan dapat diatasi[3].

---

[3] Data berasal dari buku *Key Performance indikatores Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Adab*IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi

Menjadikan Fakultas Adab sebagai "Kawah Candradimuka" yang akademis dan prospektif bagi para calon Ilmuan Humaniora.

Misi

1. Penigkatan mutu dan pengembangan kelembagaan.
2. Evaluasi objektif dan prospektif atas kurikulum yang telah ada.
3. peningkatan dan pengembangan prestasi dan kreatifitas mahasiswa.
4. Peningkatan dan pengembanngan kualitas profesi dosen dan kinerja karyawan.
5. Pencitraan yang akademis dan islamis.

b. Fakultas Ushuludin

Fakultas Ushuluddin berdiri pada tanggal 6 Juni tahun 1966 berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No.36 tahun 1966. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, Fakultas Ushuluddin secara khusus mengkaji dan mengembangkan keilmuan di bidang dasar-dasar keagamaan (*ushul al-dien*) dan pemikiran keislaman lainnya dengan tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan professional di bidang tersebut.

Untuk mengkaji dan mengembangkan keilmuan di bidang dasar-dasar keagamaan dan pemikiran keislaman, Fakultas Ushuluddin membuka tiga jurusan dan satu program studi, yakni Jurusan Aqidah-Filsafat, Jurusan Perbandingan Agama, Jurusan Tafsir-Hadits dan Program Studi Politik Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurusan *Aqidah-Filsafat* mengorientasikan diri pada kajian yang mengarah pada keilmuan yang terkait dengan dasar-dasar keimanan dan kepercayaan, baik dalam dimensi pemikirannya (ilmu kalam dan filsafat) maupun dimensi ruhaniah (tasawuf). Pada kajian ini, Jurusan Aqidah-Filsafat membekali peserta didik dan lulusannya agar memiliki kompetensi antara lain:

1) Memiliki wawasan yang luas di bidang kefilsafatan dan teologi Islam;
2) Memiliki sikap keagamaan yang kokoh, rasional dan kritis dalam menghadapi tantangan jaman;
3) Memiliki kemampuan kritis dan responsif dalam menghadapi pemikiran-pemikiran keagamaan yang berkembang dewasa ini;
4) Memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk bekerja pada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan;

Jurusan *Perbandingan Agama*, dalam orientasi kajiannya mengarah pada fokus keilmuan yang terkait dengan eksistensi agama pada umumnya, baik pada aspek sejarahnya (*history of religions*) maupun metodologisnya (*study of religions*). Pada fokus kajiannya, Jurusan Perandingan Agama membekali peserta didik dan lulusannya agar memiliki kompetensi berikut:

1) Memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara Indonesia yang Pancasilais;
2) Menguasai cara berfikir, teori, generalisasi, konsep prosedur dan fakta sebagai dasar pengembangan pengetahuan lebih lanjut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memiliki pengetahuan yang luas di bidang sosial keagamaan, budaya dan politik dan mampu bersikap kritis terhadap ilmu-ilmu sosial keagamaan;
4) Memiliki kecakapan yang memadai untuk menjadi konsultan dalam hal keberagamaan bagi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan;

Jurusan *Tafsir-Hadits*, dalam orientasi kajiannya mengarah pada fokus keilmuan yang terkait dengan metodologi penafsiran baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Pada fokus kajiannya, Jurusan Tafsir-Hadits membekali peserta didik dan lulusannya agar mempunyai kompetensi antara lain:

1) Memiliki penguasaan integral dan komperehensif tentang kajian al-Qur'an dan al-Hadits;
2) Memiliki kemampuan meneliti dan menganalisis kajian al-Qur'an dan al-Hadits dengan berbagai disiplin keilmuan;
3) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan ilmu-ilmu al-Qur'an dan al-Hadits dan menerapkannya dengan kehidupan modern;
4) Memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi konsultan dalam bidang Tafsir al-Qur'an dan ilmu Hadits.

Sedangkan *Program Studi Politik Islam*, dalam orientasi kajiannya mengarah pada fokus keilmuan yang terkait dengan teori dan praksis sosial-politik dalam perspektif Islam. Pada fokus kajiannya, Program Studi Politik Islam membekali peserta didik dan lulusannya agar mempunyai kompetensi antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berkepribadian dan memiliki kesadaran bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam;
2) Memiliki keahlian dalam mengidentifikasi, merumuskan, menjelaskan secara akademik, profesional serta memberikan alternatif pemecahan atas berbagai permasalahan politik, pemerintahan dan sosial dalam perspektif Islam;
3) Mampu mengkomunikasikan dalam bentuk verbal maupun amal terhadap hasil kajian akademik di bidang politik dan pemerintahan dalam rangka pengembangan Ilmu Politik Islam maupun dalam rangka pengabdian kepada umat dan masyarakat;
4) Memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi peneliti sosial politik dan lembaga-lembaga sosial politik dengan kontribusi analisis akademis.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri, Fakultas Ushuluddin dalam proses penyelenggaraan pendidikannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan hidup bernegara. Oleh karena itu, upaya pengembangan terus dilakukan guna merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan dunia akademik pada khususnya. Perkembangan dan tuntutan pasar kerja global, yang semula berorientasi pada kemampuan koqnitif semata seolah telah bergeser pada tuntutan profesional dan *softskill* yang handal. Untuk merespon tuntutan global tersebut, maka dunia pendidikan harus segera secara strategis merencanakan pola pengembangan dan standar kompetensi yang dibutuhkan. Di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskursus pendidikan berwawasan global, maka tema-tema sentral yang berkembang dalam paradigma baru tentang manajemen pendidikan tinggi tertuang dalam HELTS (*higher education long term strategy*) yaitu memuat isu-isu strategis tentang kemampuan kompetitif bangsa-bangsa di bidang otonomi dan kelayakan pengelolaan (*nation's competitiveness, autonomy and organizational health*).

Mengacu pada semangat yang sama, maka Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya dituntut dapat menghasilkan lulusan yang memiliki aspek ASK (*attitude, skill, knowledge*). Untuk mengembangkan pola pencapaian kompetensi dan standar pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ushuluddin menuangkan dalam perencanaan strategis yang dipergunakan sebagai ukuran evaluasi kinerjanya.

Integritas keilmuan tergambar dari kualifikasi dosen yang terukur, kualifikasi mahasiswa yang berkualitas, proses pembelajaran yang sistematis. Sedangkan pada kepastian pengelolaan pendidikan (*Management*) dibutuhkan Sarana dan prasarana, kepastian Sumber pendanaan, Pengelolaan sistem teknologi informasi, ketersedian pegawai/karyawan, Iklim akademik yang memadai, Ketersediaan sumber pembelajaran (silaby, kurikulum, buku referensi). Dalam naskah studi kelayakan ini memuat komponen pokok tersebut di atas, dengan tujuan sebagai jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan akuntabilitas publik pengelola perguruan Tinggi khususnya pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya sendiri merupakan bagian dari perwujudan kepedulian ilmiah religius kontemporer. Dalam posisi yang demikian ini maka komitmen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya adalah mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membangun masyarakat yang memiliki kedewasaan berkeyakinan dan memegang nilai-nilai religiusitas yang berwatak humanitas.

Untuk menjadi institusi Perguruan Tinggi yang berkompetens, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya harus mampu mengembangkan visi dan misinya secara maksimal, yang orientasinya akhirnya berupaya terwujudnya Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya sebagai pusat studi pengembangan dan informasi keagamaan, religiusitas kemasyarakatan serta teologi Islam terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan ahli agama yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan jaman. Hal ini sebagaimana termuat dalam visi dan misi, dan sasaran Fakultas Ushuluddin sebagaimana berikut :

Visi

Terwujudnya Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya sebagai pusat studi pengembangan dan informasi dasar-dasar sosial keagamaan serta teologi Islam terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan ahli agama yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan jaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi

1. Menyelenggarakan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Surabaya sebagai pusat studi di bidang pengetahuan sosial keagamaan dan teologi Islam di Indonesia
2. Melaksanakan pengembangan pengetahuan di bidang sosial keagamaan dan teologi Islam melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional
3. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa Fakultas Ushuluddin menjadi ahli agama yang profesional, berkualitas dan responsif terhadap tantangan jaman

Sasaran

1. Menghasilkan ahli agama yang memiliki sikap keagamaan yang kokoh, rasional dan kritis dalam menghadapi tantangan jaman
2. Meningkatkan profesionalitas ahli agama yang memiliki kemampuan responsif dan analitis dalam menghadapi pemikiran-pemikiran modern

Tujuan

1. Mengembangkan pengetahuan sosial keagamaan dan teologi Islam melalui dialog dengan pemikiran atau teori-teori modern yang tengah berkembang;
2. Mengembangkan argumentasi rasional terhadap dasar-dasar keimanan dalam rangka memperkokoh kualitas keimanan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengarahkan mahasiswa Fakultas Ushuluddin agar memiliki kemampuan logika yang mantap sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap berbagai masalah pemikiran keagamaan yang tengah berkembang[4]

3. **Struktur Kelembagaan Fakultas Adabdan Ushuludin IAIN Sunan Ampel**

Fakultas Adab	Fakultas Ushuludin
Dr. Kharisuddin Aqib, M.Ag (Dekan)	Drs. Ma'shum, M.Ag (Dekan)
Dr. Warisman M. Pd. (Pemb. Dekan I)	Drs. Loekisno, M.Ag (PD I)
Drs. Muntaha, M. Ag. (Pemb. Dekan II)	Drs. Kunawi, M. Ag (PD II)
Drs. Agusady Tony, M. Ag (Pemb. Dekan III)	Drs. H. Hamzah Tauleka.M.Ag (PD III)

Tabel 5 : Struktur Fakultas

4. **Rasio jumlah Mahasiswa per-Tahun**

Tahun Masuk	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
2003	Adab	751
	Ushuludin	861
2004	Adab	638
	Ushuludin	759
2005	Adab	445
	Ushuludin	599
2006	Adab	374
	Ushuludin	529
2007	Adab	317
	Ushuludin	550

Tabel 6 : Rasio Jumlah Mahasiswa

[4] Data terambil dari *www.iain-sunanampel/ushuludin.ac.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Dosen dan Staff Administrasi**

a. Fakultas Adab

Pendidikan dan Pengajaran dibina oleh 45 dosen tetap profesional dengan latar belakang pendidikan yang representatif, dengan rincian : 12 Doktor (di antaranya 4 profesor), 26 Magister (di antaranya 12 orang menempuh S-3) dan 7 sarjana (4 orang sedang menempuh S-2). Mereka merupakan lulusan pergururan tinggi dalam negeri dan luar negeri, seperti Sudan , Mesir, Kanada , Pakistan , Inggris dan Belanda.

Kegiatan administratif dikelola oleh tenaga-tenaga administratif yang profesional dan berkomitmen pada kelancaran program akademik fakultas, yang berjumlah 21 orang dengan rincian 15 pegawai tetap dan 6 tenaga honorer.

b. Fakultas Ushuludin

Pendidikan dan pengajaran di fakultas Ushuluddin sekarang ini dibina oleh 63 Dosen tetap dengan beragam latar belakang pendidikan yang repesentatif, dengan rincian: 3 profesor, 8 doktor, 41 Magister (9 orang di antaranya sedang menempuh S-3), dan 12 sarjana (1 orang sedang menempuh S-2). Mereka menempuah pendidikannya di dalam negeri maupun di luar negeri, di antaranya adalah dari Mesir , Canada dan juga terdapat dosen muda alumni Afrika Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan administratif dikelola oleh tenaga-tenaga administrative yang professional dan memiliki komitmen demi kelancaran kegiatan akademik, yang berjumlah 11 pegawai tetap dan 11 pegawai honorer.

6. Fasilitas Fak. Adab dan Ushuludin

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menempati 2 gedung seluas 1640 m 2, dengan rincian ; 15 ruang kuliah, 1 ruang pimpinan, 2 ruang administrasi, 1 ruang jurusan, 1 ruang laboratorium, 1 ruang dosen, 1 ruang dosen wali, 1 ruang gudang dan lain-lain. Sarana penunjang kegiatan administrasi mencakup komputer dan kreatifitas intelektual dosen ditampung dalam Jurnal, yaitu: jurnal Madaniya dan Qimah, dengan penerbitan 2 kali pertahun.

Sedangkan fakultas Ushuluddin, menempati sebuah gedung yang berlantai 3 (tiga) dengan rincian : 15 ruang kuliah, 3 ruang pimpinan, 1 ruang administrasi, 2 ruang jurusan, 1 laboratorium, 1 ruang dosen, 1ruang siding. 1 ruang penerbitan, dan 1 gudang. Sarana penunjang administrasi mencakup 12 komputer, 2 OHP dan 1 LCD. Kreatifitas Dosen ditampung dalam jurnal ilmiah yaitu AL-AFKAR yang terbit 2 kali pertahun

B. PENYAJIAN DATA

1. Prosedur pembuatan kebijakan

a. Fakultas Adab

Sebelum dijelaskan secara gamblang tentang prosedur pembuatan kebijakan yang biasa dilaksanakan oleh Fakultas Adab. Hanya sekedar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa Dekan Fakultas Adab adalah pimpinan baru. Beliau baru saja menjabat 2 bulan sebelum wawancara ini dilaksanakan. Secara otomatis ada beberapa hal yang secara prosedur teoritik tidak bisa dijawab dikarenakan belum pernah membentuk kebijakan-kebijakan progresif dan berkelanjutan.

Meski demikian, biasanya menurut pak Aqib:

> "proses pembuatan kebijakan Fakultas Adab itu, berawal dari proses visi dan misi pimpinan, sedangkan visi dan misi pimpinan itu, merupakan penjabaran (break down) dari visi dan misi IAIN yang sudah ada."[1]

Dari visi dan misi yang sudah ada kemudian dibentuk satu strategi-strategi untuk menghasilkan satu bentuk kebijakan-kebijakan.

Disaat ditanya, bagaimanakah proses pengevaluasian yang biasa dilaksanakan untuk menilai program kebijakan yang sudah ada?. Dekan Fakultas Adab menyebutkan bahwa proses tersebut, biasanya dilaksanakan pada setiap satu semester sekali, dengan mengundang beberapa elemen dosen dan struktur yang sudah ada. Namun, proses ini belum pernah dipandu langsung oleh dekan yang bersangkutan dikarenakan baru 2-3 bulan beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Adab.

Intinya, proses kebijakan-kebijakan yang ada di Fakultas Adab masih merupakan kebijakan umum yang sudah di analisa oleh Institut dan Fakultas hanya pada poros pembuatan tekhnis atau pembentuk team pelaksana dari kebijakan umum yang diberikan oleh institut.

---

[1] Wawancara dengan Dekan Fakultas Adab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hampir, mayoritas itu kebijakannya Rektorat, fakultas hanya melaksanakan, menginstruksikan, membentuk team pengelola dalam program khusus itu."

Dalam proses wawancara sekitar 30 menit lebih kami, belum menemukan satu jawaban prosedur dan proses kebijakan yang dikeluarkan secara khusus oleh fakultas adab. Namun, ada beberapa bentuk-bentuk kebijakan yang mungkin akan dibahas didalam proses pembahasan selanjutnya tentang produk-produk kebijakan baik yang umum dari Institut, atau dari jurusan dan fakultas.

b. Fakultas Ushuludin

Berbeda dengan di Ushuludin, kami mendapatkan gambaran proses pembuatan kebijakan (*policy*) yang biasa dilaksanakan. Menurut Bpk, Ma'sum (dekan Fakultas Ushuludin) menyebutkan:

> "dalam proses pengambilan kebijakan biasanya kita mengumpulkan data dari struktur terkait, mulai dari jurusan, akademik dan dosen kita kumpulkan dan kemudian kita evaluasi, menentukan visi dan misi, kemudian diarahkan kepada proses penggodokan dalam hal input kebijakan".[2]

Dalam proses selanjutnya, adalah mengevaluasi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam skala semester. Dari kebijakan yang dilaksanakan Fakultas Ushuludin biasanya memanggil seluruh objek kebijakan – mahasiswa dalam hal ini - untuk memberikan satu penilaian dari capaian-capaian kebijakan yang dilaksanakan. Misalnya, ada kebijakan peningkatan proses sistem belajar-mengajar dosen, karena mahasiswa merupakan konsumen dari proses itu, maka di tanyakan dari

[2] Wanacara dengan Dekan fakultas Ushuluddin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekian banyak dosen yang mengajar, siapa sajakah yang keluar dari sistem yang sudah ditentukan oleh Dekan, melalu kebijakan yang sudah dibentuk dan disepakati bersama.

> "Dulu, sebelum ada KPM di IAIN, kita sudah membentuk kebijakan peningkatan mutu proses belajar mengajar, untuk menilainya kita memanggil kosma-kosma, dari situ kita mendapatkan masukan-masukan untuk dijadikan bahan evaluasi dosen"

Dari suatu kebijakan-kebijakan yang akan atau sudah dibentuk, Fakultas Ushuludin membutuhkan strategi jitu untuk tidak membentuk konsistensi sesuai pada capaian kebijakan yang sudah disepakati. Oleh karenanya, dibutuhkan satu arahan dan sosialisasi yang tidak menyinggung dari objek kebijakan tersebut. Dosen, yang dikategorikan nakal dari data yang didapat proses pengevaluasiannya tidak seperti KPM, namun secara general. Khusus, pada mahasiswa sosialisasi paling utama sosialisasi biar tidak di demo oleh mahasiswa.

Untuk sementara, dengan pemaparan dari hasil wawancara di atas, Fakultas Ushuludin, sebagaimana yang disebutkan oleh bapak Dekan Fakultas Ushuludin sudah menggunakan *Total Quality Manajemen* (TQM), sehingga seluruh prosedur-prosedur dalam mengambil kebijakan yang baik dan bagus mesti dilaksanakan, sebagai bentuk implementasi dari sistem menejerial yang dianut.

2. Peningkatan Mutu Lulusan

a. Fakultas Adab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Raw *Input* (Mahasiswa)

Input mahasiswa Fakultas Adab dapat dikategorikan sebagai fakultas yang selalu mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir, bahkan menurut Dekan Fakultas Adab bentuk seleksi yang *centralistic* Fakultas Adab tidak bisa melaksanakan seleksi sendiri, melalui kriteria kualitas yang sebenarnya untuk meningkatkan kualitas Fakultas Adab. "Hal ini dikarenakan *Input* mahasiswa Fakultus Adab selalu dibawah Pagu". Jawab Dekan Fakultas Adab.

Berbeda dengan *input* pada Program Khusus, disitu dilaksanakan seleksi tentang pengetahuan bahasa Arab dan seleksinya cukup ketat, kemampuan mereka benar-benar diukur. Sedangkan *input* yang masuk pada program Reguler (umum), *input*nya disinyalir atau sudah menjadi "tersangka" tidak berjalannya capaian yang dilaksanakan oleh Jurusan atau Fakultas Adab. Terkadang *input* mahasiswa Adab sangat minim dalam hal penguasaan bahasa arab, bahkan tidak berminat untuk belajar Bahasa Arab. Namun, karena mereka sudah diterima, maka tugas kita untuk mendidik dan memanjakan mereka. Programnya, ialah intensifikasi kebahasaan.

Intensifikasi Kebahasaan ini dilaksanakan dikarenakan *input* Fakultas Adab kualitasnya rendah baik dalam hal keislaman ataupun kebahasaannya. Sehingga nantinya, disaat mereka masuk pada jurusan Sastra Arab ataupun yang lainnya mereka tidak menjadi bingung lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang, didalam Fakultas Adab bahasa arab merupakan *core subject* yang mesti dipahami lebih awal. Meski tidak begitu signifikan pengaruhnya pada *standard* kompetensi lulusan, karena termasuk program wajib yang juga dilaksanakan diseluruh Fakultas di IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pengetahuan Umum tentang keislaman. Sedangkan dalam kaitan pada lulusan, hal itu merupakan perihal dan tanggung jawab jurusan yang mesti menyediakan relevansi kurikulum untuk menggapai aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dirumuskan oleh jurusan.

2) Proses

Cakupan proses memang cukup luas, dari proses belajar mengajar, kurikulum dan juga manajerial. Namun, yang paling berkaitan langsung pada lulusan (*greduate*) dalam pandangan kami – dan sebagian besar peneliti– adalah kurikulum. Kurikulum merupakan *blue print startegy,* penuntun proses pembelajaran yang ada. Apabila muatan kurikulumnya bagus, konsekwensi logisnya proses belajar mengajarnya akan berjalan bagus pula. Dengan catatan, dosen yang bersangkutan melaksanakan kurikulum, silabus, dan RPP-nya secara seksama.

Dikarenakan *input* yang kurang berkualitas, maka Fakultas Adab menyediakan pelbagai program-program kurikulum yang dilaksanakan. Salah satunya merelevansikan kurikulum pendidikannya dengan kompetensi lulusan yang diharapkan *based on* visi dan tujuan yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diungkapkan lebih awal di atas . Adapun Kurikulum Fakultas Adabyang dicanangkan sebagai berikut :

No	Jurusan	Bentuk Kurikulum
1	Bahasa dan Sastra Arab (BSA)	Meliputi mata kuliah kompetensi dasar (MKDU) dan kompetensi keahlian (MKK) terkait dengan materi, ilmu-ilmu, teori dan metodologi bahasa dan sastra Arab.
2	Sejarah Peradaban Islam (SPI)	Meliputi mata kuliah kompetensi dasar (MKDU) dan kompetensi keahlian (MKK) terkait dengan materi, ilmu-ilmu, teori dan metodologi sejarah dan peradaban Islam serta teori-teori ilmu sosial

Tabel: 7

Bentuk kurikulum yang ada diatas, sama seperti dibeberapa institusi fakultas lainnya. Kompetensi Umum biasanya berisikan tentang pengetahuan kefilsafatan, logika, pengantar studi islam dan metodologi penelitian. Sedangkan, muatan kurikulum yang berikutnya adalah muatan keahlian. Dari sinilah citera dan ke-khasan Fakultas Adab sebagai reproduksi sejana kesastraan Islam atau sejarawan muslim. Berdasarkan diatas, pengetahuannya diarahkan kepada hal-hal teoritik dari kedua jurusan yang sudah ada. BSA, pastilah kemampuan mempraktekkan, menganilisa sastra Arab. Sedangkan SPI, pengetahuan tentang Sejarah islam, mengenali simbol-simbol, fakta dan bukti keberadaan budaya islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses umum lainnya selain penjaminan mutu, yang berada di bawah komando Jurusan. Proses peningkatan mutu Fakultas dilaksanakan pula praktikum-praktikum untuk menjelaskan pengetahuan teoritik yang didapatkan, kemudian diimplementasikan kepada dunia praktek. Untuk Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) mereka melaksanakan praktikum dengan menganalisa hasil-hasil penelitian atau karya yang ada kaitannya pada semiotika kebahasaan. Baik dalam hal filologi, phonnology atau aspek kesesustraan. Sedangkan pada jurusan Sejarah Peradaban Islam, Praktikumnya berbentuk kajian arkeologis dan kesejarahan. Seluruh mahasiswa Fakultas Adab diwajibkan untuk menyelesaikan penelitiannya di akhir studinya.

Input bagus, kualitas proses bagus maka akan mengahasilkan kualitas *out put* yang bagus, namun yang terjadi di Adab *input* rendah, maka dibutuhkan kualitas proses yang bagus untuk menghasilkan kualitas *out put* yang bagus" inilah penggalan wawancara dengan dekan fakultas adab. Fakultas Adab, menilai kualitas proses menggunakan beberapa instrumen, yakni kerajinan mahasiswa dan capaiannya, nilai kerajianan yang didapat oleh dosen.

Hal ini kemudian dievaluasi pada setiap akhir semester. Bagi mahasiswa yang tidak sampai pada 75 % presentasi (kehadirannya) maka tidak boleh mengikuti ujian. Sedangkan bagi, dosen mereka akan ditegur melalui fakultas, ataupun oleh KPM IAIN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya, apa yang dijelaskan diatas *commonly thing*. Semuanya sudah terprogram dalam bentuk rentsra (rencana strategis) dan renop (rencana operasional) yang secara rutin dilaksanakan oleh semua lembaga manapun. Renstanya sebagaimana terlampir.

3) Output (lulusan)

Untuk menilai kualitas out put, instrumennya berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Lulusan Fakultas Adab secara kualitatif secara landasan kompetensi yang dibuat oleh Fakultas Adab sebagai berikut :

- Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, potensi lulusannya adalah menjadi guru bahasa arab di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, peneliti penerjemah dan penulis sastra. Menurut pandangan Dekan banyak lulusan Adab yang mampu menjadi guru bahasa di Sekolah dan perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta. Dekan menambahkan perberlakuan kebijakan guru cukup dengan S-1 saja, menjadikan peluang terbuka untuk lulusan adab berkompetensi dengan fakultas lainnya.
- Jurusan Sejarah Peradaban Islam, kompetensi lulusannya hampir sama dengan jurusan BSA, yakni menjadi guru bidang sejarah peradaban islam, peneliti, pengamat timur tengah dan arkeolog islam. Untuk menjadi pengamat timur tengah yang tak kunjung usai, ini menjadikan peluang bagi lulusan Fakultas Adabmenjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamat. Pasalnya, hampir mayoritas bahasa di Timur tengah menggunakan artefak bahasa Arab.[3]

Potensi lulusan yang dijelaskan di atas, berbeda dengan data di atas di *website* istitut dijelaskan bahwa kompetensi lulusan di Adab sebagai berikut :

Jurusan SPI	• Membentuk sarjana yang profesional dalam penulisan dan penelitian sejarah dan peradaban serta pemikiran Islam, baik klasik maupun kontemporer; • Mencetak sarjana yang memiliki pengetahuan tentang paradigma ilmu-ilmu sosial sebagai kerangka analisis disiplin ilmu sejarah; • Membentuk sarjana yang ahli tentang sejarah sosial, politik dan ekonomi umat Islam, baik klasik maupun kontemporer.
Jurusan BSA	• Membentuk sarjana yang ahli dalam menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab, baik yang klasik maupun kontemporer; • Membentuk sarjana yang ahli berbicara secara aktif, mampu menerjemahkan secara langsung untuk menjadi juru bicara atau penerjemah dalam bahasa Arab dan sebaliknya; • Memiliki kemampuan profesional sebagai penulis, peneliti, penerjemah dan profesi lain yang memerlukan basis keahlian bahasa Arab.[4]

Tabel: 8

Selain pada berapa potensi secara kualitatif. Kualititas lulusan pula diukur menggunakan kuantitas (jumlah) lulusan pada setiap tahunnya dalam melaksanakan proses studinya. Jauh-jauh hari, Fakultas Adab

[3]Brosur penerimaan mahasiswa baru.
[4] .iain-sunanampel.ac.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang sempat tercoreng dengan perilaku beberapa mahasiswanya yang tidak bisa lulus sampai pada limit waktu tersedia yakni 14 semester (8 tahun), namun hal itu tidak terjadi lagi pada saat ini, kuantitas lulusan Fakultas Adab bisa dikatakan meningkat untuk tahun 2008-2009 kemaren.

Kami pun sempat menanyakan tentang berapa mahasiswa yang menganggur dan berhasil. Namun, kami belum mendapat jawaban secara pastinya. Hal ini dikarenakan lulusan yang sudah lulus jarang berkomunikasi lagi untuk melaporkan kesibukan yang didapatkan oleh lulusan fakultas adab. "perlu diakui bahwa mayoritas lulusan setelah mengambil ijazah mereka sudah diserahkan kembali kepada kehidupan kemasyaratan. Dan jarang kembali untuk melaporkannya kepada pihak fakultas tentang kesibukannya, hanya sebagian saja yang masih kelihatan di sini"

b. Fakultas Ushuludin

1) Raw *Input*

Sebagaimana diketahui Fakultas Ushuludin merupakan fakultas kedua yang menjadi pilihan terakhir bagi mahasiswa baru yang memilih perkuliahannya di IAIN sunan Ampel surabaya. Hampir sama dengan Adab dari beberapa tahun terakhir kuantitas input Fakultas Ushuludin menurun. Perlu diketahui mungkin, bahwa menurut Prof. Dr. Nur Syam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sekarang menjabat Rektor hanya satu fakultas yang tidak mengalami penuruan yakni Fakultas Tarbiyah.[5]

Meski demikian, sebenarnya di dalam pengelolaan *input*-nya Fakultas Ushuludin mempunyai kualifikasi umum yang dibuat oleh Fakultas. Adapun Kualifikasi Mahasiswa sebagai berikut :

a) Lulus dari sekolah SMU/MA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Transkrip Nilai oleh sekolah dimana yang bersangkutan belajar.
b) Lulusan Pesantren Muadalah yang diakui kualitasnya dan disetarakan dengan pendidikan formal.
c) Mempunyai sertifikat TOFEL/TOAFEL
d) Mampu membaca dan menulis al Qur'an.
e) Mempunyai prestasi akademik
f) Mempunyai Prestasi menghafal al Qur'an beberapa Juz[6]

Relitasnya, berkata lain. Kualifikasi tidak dibuat oleh fakultas, sistem kualifikasi mahasiswa IAIN menggunakan kualifikasi umum yang dilaksanakan dalam tingkat Institut. Oleh karenanya, kualifikasi yang ada diatas hanya untuk formalitas saja. Hal itu juga dibenarkan oleh Dekan Fakultas Ushuludin yang menyebut bahwa Fakultas Ushuludin adalah pilihan terakhir dari test kualifikasi yang biasanya dilaksanakn

---

[5]Renstrasi
[6]Data didapat dari prosedur penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ushuluddin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilingkungan IAIN dan pengembangannya dilaksanakan pada saat proses pengelolaan *input*.

Dari dua fakultas terdapat program-program yang dicanangkan oleh Departemen Agama (DEPAG). Di Fakultas Adabada jurusan BSA Khusus. Sedangkan di Ushuluddin juga terdapat jurusan Tafsir Hadits internasional. Dua program mempunyai input yang cukup bagus, karena diseleksi dan dinilai oleh fakultas. Sehingga apa yang disebutkan diatas benar-benar bisa dijalankan dengan seksama.

2) Proses

> "Karena input sudah sepeti itu, maka disini (proses) kita tekankan untuk meningkatkan mutu"

Sebut dekan fakultas Ushuludin. Hampir empat tahun sekali muatan kurikulum yang ada di ushuludin selalu dirombak dan diganti untuk menyesesuaikan dengan tuntutan global. Relevansi kurikulum berupa dari bentuk silabi, proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya, penekanan terhadap pengetahuan lapangan bagi mahasiswa ushuludin.

> "setiap satu tahun sekali, jurusan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk meneliti di lapangan secara langsung. Misalnya, TH itu disuruh kepesantren-pesantren untuk mencari kitab-kitab tafsir apa yang cocok dan dikaji."

Sehingga, mahasiswa benar-benar tertata betul antara pengetahuan dan kemungkinan pengalaman apa yang bisa diberikan nantinya di masyarakat.

Kompetensi-kompetensi yang dilaksanakan di Fakultas Ushuludin adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jurusan	Standard Kompetensi (Kurikulum)
1	Aqidah Filsafat (AF)	Kurikulum yang dilaksanakan di Jurusan ini menggunakan KBK, dengan Penetapan kompetensi lulusan berdasarkan visi dan misi Jurusan, Struktur Kurikulum, Sebaran Kurikulum berdasarkan kompetensi, semester dan pengampunya. Selain itu juga dirumuskan Silabus dan SAP per mata kuliah.
2	Tafsir Hadits (TH)	**Kompetensi dasar,** yang berisikan tentang kompetensi pengetahuan keislaman yang umum dan kemasyarakatan. **Kompetensi Utama,** yakni *core subjeck* dari suatu konstruksi kemampuan dalam ilmu tafsir dan hadits. **Kompetensi Pendukung/penunjang,** yakni pengetahuan-pengetahuan tentang proses pengablikasian keilmuan. Mis, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3	Studi Agama-Agama	kurikulum yang memiliki kompetensi keahlian yaitu bidang pendidikan dan pengajaran (pendidikan agama Islam), dakwah islamiyah dan jurnalistik publistik

Tabel : 9

Hingga sampai penulisan skripsi ini diselesaikan, penulis belum menemukan data yang menggambarkan tentang prodi Politik Islam (PI), oleh karenanya penulis pun tidak menemukan konsep muatan kurikulum yang dikembangkan dalam prodi ini. Tapi, menurut Dekan Fakultas Ushuludin, Politik Islam merupakan satu program studi yang lebih gampang dicarikan muatan lapangannya ketimbang beberapa jurusan yang lain. Karena demokrasi yang terbuka di Indonesia memberi peluang luas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk lulusan prodi ini menjadi pengamat politik khususnya bagi partai politik berbasiskan islam.

Dari kerangka kurikulum dan pelbagai kompetensinya, sudah cukup kemudian untuk mengantarkan mahasiswa-mahasiswa yang berproses di Ushuludin mempunyai bekal untuk di masyarakat. Karena relevansi selalu ditekankan sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Bagimanakah hasil proses tersebut selama ini? Itulah yang menjadi permaslahan selanjutnya. Dengan tugas yang cukup memberatkan perubahan-perubaha kurikulum biasanya berakibatkan pada suatu resistensi untuk ditolak oleh pelakunya. Bapak Ma'sum – selaku dekan – menjawab:

> "kami memang tidak gampang melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan sosialisasi yang sangat intent, hingga kemudian benar-benar bisa dipahami tujuannya untuk mengembangkan kualitas proses yang ada di Ushuludin, anda mungkin masih ingat dulu waktu awal-awal saya naik, dan memberlakukan ini ada demo dari mahasiswa".

Beberapa hal yang ada diatas akan berimbas betul terhadap proses mahasiswa. Padahal tidak kalah pentingnya juga tentang dosennya. Rupanya di Fakultas Ushuludin dosenpun diberikan arahan untuk menjadikan satu mata kuliah yang diajarkan itu akan berkaitan dengan perkuliahan yang lain, sampai pada proses relevansinya.

Misalnya pada jurusan Aqidah-Filsafat, Dosen diberikan bekal untuk menjadikan ilmu tasawuf-falsafi (filsafat tasawuf) layaknya al-Ghozali dikaitkan dengan ESQ, SEF, dan lain sebagainya. Demikian juga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang karya tulis banyak dikembangkan buku-buku bertemakan tentang kajian Eksplor Spiritual, Main game, Motivator, dan lain sebagainya.

Begitu pula di Jurusan Pendidikan Agama-Agama pengetahuan mahasiswa tentang keagamaan dipraktekkan untuk menganalisa langsung pada bentuk peribadatan dan konflik of interest antar agama-agama. Pada saat ini, memang lagi *trend* untuk mendiskriminasikan satu golongan didalam agama. Disinilah mahasiswa studi agama-agama mengambangkan intelktualitasnya terhadap proses penyelesaian konflik tersebut.

3) Output (Lulusan)

"insya Allah rata-rata lulusan disini itu, 4-5 tahun lah. Mungkin ada juga satu dua yang sampai bertahun-tahun tidak lulus".

Rata-rata memang lulusan ushuludin normal-normal saja. Ini terbukti ada peningkatan signifikan di tahun 2009, lulusan ushuludin bertambah. Berhubungan dengan kuantitasnya itu didukung pula adanya jurusan tafsir hadits internasional yang di *deadline* harus menyelesaikan perkualiahannya dalam 4 tahun.

Sedangkan dalam tatanan kualitas lulusan (*qulity of output*) dijelaskan bahwa lulusan ushuludin harus mempunyai kompetensi teoritis dan praktis yang mendalam di bidang sosial keagamaan dan teologi Islam. Indikatornya adalah sebagai berikut :

Komponen Kognitif:	a) Memahami secara mendalam kerangka teoritis di bidang dasar-dasar ketauhidan Islam; b) Memahami secara mendalam kerangka teoritis di bidang hukum dasar tekstual Islam terutama di bidang Al-Qur'an dan Al-Hadith;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	c) Memahami secara mendalam isu dan wacana aktual tentang pemikiran keagamaan, terutama masalah sosial keagamaan dan teologi Islam; d) Memahami secara mendalam metodologi penelitian sosial keagamaan dan Teologi; e) Menganalisis persoalan keagamaan terutama aqidah serta dasar hukum tekstual Islam; f) Memahami teori-teori konseling dan interaksi sosial ; g) Menafsirkan kondisi sosiologis terkait persoalan kegamaan dan dasar hukum tekstual; h) Memecahkan persoalan sosial terkait dengan masalah kegamaan dan teologi.
Komponen Afektif :	a) Memiliki sikap yang obyektif dan akademik dalam mengkaji persoalan teoritis terkait dengan permasalahan akidah Islam maupun dasar hukum tekstual Islam; b) Memiliki sikap yang apresiatif dan responsif terkait dengan perkembangan pengetahuan di bidang aqidah dan dasar hukum tekstual Islam; c) Memiliki sikap yang adaptif dalam rangka memperoleh aktualitas pemikiran atau isu keagamaan terutama di bidang akidah dan dasar hukum tekstual yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat; d) Memiliki sikap yang aktif dan obyektif dalam membahas perkembangan pemikiran atau isu keagamaan terutama sosial keagamaan dan teologi. e) Bersikap proaktif dalam pengembangan dan penelitian di bidang pemikiran keagamaan terutama sosial keagamaan dan telogi; f) Bersikap obyektif dan netral dalam melaksanakan penelitian. g) Memiliki sikap obyektif dan netral dalam menyikapi berbagai persoalan dibidang keagamaan terutama sosial keagamaan dan teologi; h) Bersikap proaktif dalam menyelesaikan persoalan di bidang keagamaan terutama sosial keagamaan dan teologi.
Komponen Psikomotorik/ Ketrampilan :	a) Terampil dalam mengidentifikasi persoalan sosial keagamaan dan teologi secara teoritis; b) Terampil menciptakan kerangka teoritis dasar-dasar sosial keagamaan dan teologi; c) Terampil dalam merancang karya tulis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	berkualitas tentang pemikiran keagamaan terutama di bidang sosial keagamaan dan teologi; d) Terampil dalam menyusun karya tulis yang baik dan berkualitas dalam hal pemikiran keagamaan terutama di bidang sosial keagamaan dan teologi; e) Terampil dalam mengidentifikasi obyek-obyek penelitian keagamaan terutama di bidang sosial keagamaan dan teologi; f) Mendesain prosedure penelitian di bidang pemikiran keagamaan terutama sosial keagamaan dan teologi; g) Terampil dalam melaksanakan proses konseling dan desain konsultatif terkait dengan pemikiran keagamaan terutama di bidang sosial keagamaan dan teologi; h) Terampil dalam menangani berbagai permasalahan terkait dengan pemikiran keagamaan terutama di bidang sosial keagamaan dan teologi.

Tabel: 10

Semuanya ini merupakan kompetensi umum yang dijabarkan lagi di jurusan masing-masing, untuk mengetahui data tersebut sebagaimana yang sudah di sebutkan di profil ushuludin di atas. Dikala ditanya, dari sekian indikator serta kompetensi yang dikembangkan tidak disebutkan secara spesifik tentang profesi apa yang nantinya bisa dilaksanakan. Kalau di Adab dijelaskan bahwa profesi minimalnya adalah sebagai guru. Di ushuludin, sebagaimana disebutkan oleh dekan Fakultas, bahwa Ushuludin tidak mencetak tenaga kerja, disini semua komponennya merupakan *pure sciencetific studies* (kajian keilmuan murni). Nantinya, lulusannya kebanyakan tidak berharap pada duniawi. "Rizqi itu tuhan yang ngatur mas" Sebutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produk kebijakan Fakultas dalam Peningkatan Mutu Lulusan

Produk kebijakan adalah bentuk kebijakan strategis yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk menghilangkan aspek-aspek yang tidak memuaskan didalam proses peningkatan kualitas lulusan di dua fakultas tersebut. Oleh karenanya, dua dekan yang kami wawancarai sudah membentuk kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakannya untuk beberapa tahun ke- depan.

Adapun bentuk-bentuk produk kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fakultas Adab

1) Kurikulum *Entrepreneurship.* Kurikulum yang satu ini memang menjadi sepertinya menjadi penyelesaian permasalahan di balik keterpurukan ekonomi Indonesia. Maklum content dari kurikulum ini adalah untu mempersiapkan para muda-mudi penerus bangsa untuk menjadi mandiri serta tidak bergantung pada lowongan kerja yang disediakan oleh Negara (PNS). Di Fakultas Adabkurikulum inipun sudah dilakanakan untuk mahasiswa angkatan 2009. Tujuan kebijakan ini untuk memberikan pengetahuan tentang dunia usaha yang nantinya bisa dilaksanakan oleh lulusan Fakultas Adab.

2) Pembentukan Lembaga Penerjemahan. Lembaga penerjamahan merupakan cerminan dari jurusan BSA, yang spesifik terhadap buku-buku dari timur tengah. Melalui lembaga ini, Fakultas Adabbisa mengadakan kerjasama dengan penerbit buku. Selain dapat dijadikan pemasukan terhadap fakultas, program ini bisa menjadikan proses pembekalan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa BSA untuk menjadi profesi penerjemah buku. Status kebijakan ini masih akan dilaksanakan.

3) Pengasramaan dan Hafalan ak-Qur'an 4 Juz dan Hadits 100. Pengasramaan ini rupanya dilaksanakan akibat *input* Fakultas Adabyang kurang kompetensi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menyeragamkan kemampuan keagamaan dan kebahasaan yang dimiliki oleh Mahasiswa. Selain pengasramaan, untuk meningkatkan kualitas lulusan, Mahasiswa diwajibkan menghafal 4 juz al-Qur'an dan 100 hadits. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada mahasiswa yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi – yang biasanya memberikan persyaratan seperti itu, khususnya di timur tengah - atau bekal untuk di masyarakat nantinya. Hal ini sudah dilaksankan mulai tahun ajaran ini.

b. Fakultas Ushuludin

1) Peluasan Aspek Relevansi Kurikulum. Semua yang dilaksanakan diatas rupanya masih belum cukup bagi dekan fakultas ushuludin. Mengembangkan relevansi kurikulum di beberapa jurusan yang masih belum bisa melaksanakan dengan baik.

2) Penambahan Praktek Lapangan. Hingga pada saat ini, hanya ada satu jurusan yakni Studi Agama-Agama yang dikira mempunyai praktikum yang sesuai poros lulusannya nantinya. Yakni diterjunkan langsung kelapangan untuk menyelesaikan konflik keagamaan yang menjadi permasalahan di Masyarakat. Sedangkan jurusan lain masih perlu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan arahan-arahan untuk membentuk praktikum yang serupa jurusan studi agama-agama.

B. ANALISIS DATA

Dalam proses analisis data ini, akan dijelaskan kesesuaian antara teori dan temuan dilapangan. Pada prosesdur pembuatan kebijakan (*policy making*), proses peningkatan mutu lulusannya. Selanjutnya adalah format strategi dan kebijakan yang dilaksakan untuk peningkatan mutu. Untuk lebih jelasnya, mungkin dijelaskan apakah kebijakan itu?

Kebijakan secara teoritik adalah kompromi politik yang dilaksanakan oleh para pemimpin (*top manajer* dalam manajemen) untuk menyelesaikan sebuah problematika yang sedang dihadapi. Di Fakultas Adabdan Ushuludin merupakan dua prodi yang menjadi *sample* Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. Dekan dan Kepala jurusan adalah *policy maker*-nya, yang secara teoritik mereka mempunyai kebijakan meso, yakni kebijakan yang secara skala paling kecil dalam dunia pendidikan.

Jadi, secara teoritik dua fakultas tersebut mempunyai *domain* untuk membentuk kebijakan. Domain mereka tidak sama seperti perusahaan, rupanya kebijakan-kebijakan yang dibentuk fakultas merupakan *break down* dari analisa-analisa visi dan misi Institut (lembaga birokratis di-atas fakultas). Oleh sebab tu, *domain*nya dibatasi untuk menganalisa problem-probelm fakultatif, yang salah satunya adalah kualitas *input* yang rendah dialami oleh dua fakultas tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualitas *input directly* berdampak pada kualitas *out put* oleh karenanya secara teoritik dinyatakan bahwa dibutuhkan program-program relevan bagi *input* yang kurang bagus. Dan temuan dilapangan ditemukan beberapa program peningkatan mutu pendidikan tinggi secara global dan juga peningkatan mutu internal yang berimbas langsung pada mutu lulusan.

Untuk lebih memudahkan untuk menganalisa teori dan temuan dilapanangan dalam penelitian ini dikategorikan dalam kerangka sebagai berikut :

1. **Prosedur dan alur Pembuatan kebijakan**

Dalam prosedur pembuatan kebijakan menurut Stiner disebutkan bahwa kebijakan berawal dari analisa permasalahan, formulasi, peramalan dan Evaluasi kebiajakan. Analisa permasalahan disebutkan sebagai satu bentuk pengumpulan-pengumpulan data-data dari sumber yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut. Formulasi merupakan proses pengolahan data, formulasi juga hampir sama dilaksanakan oleh petugas-petugas yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam melaksanakannya.

Setelah semuanya diformulasikan memikirkan dampak dampak yang akan diakibatkan oleh kebijakan tersebut, baik dalam pada ranah yang prositif maupun negatif sekalipun. Dengan diberlakukannya ini, suatu bentuk kebijakan bisa dievaluasi menggunakan instrument-instrumen yang sudah ditentukan sebelum diberlakukan secara konsisten.

Temuan dilapangan, menyatakan dua fakultas dilingkungan IAIN Sunan Ampel surabaya ini, sudah melakukan prosedur-prosedur yang ada dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teoritik diatas. Meski, dalam implemenntasinya berbeda-berbeda pandangan tentang asal muasal dan prosedur kebijakan yang biasa dibentuk. *Pertama* di Fakultas Adabpembuatan kebijakannya dilaksanan menggunakan pandangan yang sangat birokratik. Bahwa kebijakan yang ada di Fakultas itu turunan dari kebijakan pusat sehingga analisa dan data-data yang dbutuhkan sudah dilaksanakan di tingkat Institut. Fakultas Adabhanya mempunyai kebijakan tekhnis saja.

Kedua, di fakultas ushuludin, Dekan Fakultas Ushuludin membentuk kebijakan-kebijakan dengan prosedur pemanggilan kajur-kajur, kemudian diformulasikan dan disepakati bersama untuk diimplementasikan berbentuk strategi dan program. Selanjutnya, ada juga evaluasi yang dilaksanakan pada saat akhir semester dan empat tahun sekali untuk mengembangkan kebijakan. Dan mengukur jabaran capaian yang sudah dilaksanakan.

Jadi, semuanya memang melaksanakan prosedur kebijakan. Meski kebijakan tekhnis sekalipun, hal-hal yang berkaitan dalam prosedur analisa dan formalisasinya juga dilaksanakan oleh Rektorat. Kelemahannya, sebenarnya ciri *khas* kebijakan dalam pendidikan yang sangat *centralistik* juga tidak bisa di lepaskan. Batasan-batasan kebijakan yang bisa dilaksanakan fakultas seakan menjadi duri untuk banyak melaksanakan kegiatan.

Padahal menurut H.A.R Tilaar untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi, implementasi otonomi kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan keahlian analisis lembaga terhadap kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswanya sendiri. Demokratisasi dan otonomisasi kebijakanpun juga dibutuhkan. Tanpa harus meninggalkan prosedur yang berbelit-belit di dunia birokratik.

Untuk menciptakan satu kebijakan strategis, harus disetujui oleh pelbagai kantor-kantor, seandainya kebijakn untuk meningkatkan kualitas *input*, jurusan disarankan untuk memberi tahukan dalam model tembusan kepada fakultas, dari fakultas ke Rektorat dan dimintai persetujuan ke-Departement Agama. Sehingga, dalam benak pemikiran para pemimpin lembaga pendidikan *wait and see* (menunggu dan melihat) merupakat kebudayaan yang sering terjadi. Menunggu kebijakan pusat untuk bisa diberlakukan di lembaga yang sedang dikelolanya.

Kreatifitas inisiatif untuk memberlakukan kebijakan mandiri sangat sulit sekali. Budaya *corporate* memberlakukan daya saing, dibutuhkan fluktuasi kebijakan yang setiap saat berubah sesuai dengan tuntutan zaman, tempat yang dihadapinya. Bukan menunggu kebijakan pusat dalam skala nasional, yang secara letak geografisnya tidak serupa.

2. Konsep Peningkatan mutu Lulusan

Dari data yang didapat, bahwa peningkatan kualitas lulusan dilaksanakan di dua fakultas yang penulis teliti menggunakan prinsip peningkatan mutu yang terstruktur sesuai dengan pedoman lembaga penjaminan mutu yang di bentuk oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dalam proses pelaksanaannya mempunyai aplikasi yang berbeda-beda memang hal yang biasa. Karena, disesuaikan melalui analisa kebutuhan yang ada di Fakultas Masing-Masing. Problem utama yang dihadapi di dua fakultas ini, adalah kualitas *input*. Input-inputnya, merupakan saringan terakhir dari ketentuan umum yang dibentuk oleh IAIN Sunan Ampel surabaya.

Bahkan, kalau mencuplik dari ungkapan-ungkapan hasil wawancara yang didapatkan input Adab adalah "tersangka" tidak berjalannya sebuah proses. Sedangkan di Ushuludin, inputnya merupakan input "pilihan terakhir" yang dititipkan di Fakultas Ushuludin. Dengan demikian, jelas sekali, bahwa problem utamanya adalah kualitas *input*.

Padahal teori, menyebutkan untuk mendapatkan kualitas lulusan yang bagus ditentukan oleh *input* mahasiswa berkualitas bagus dan mempunyai harapan-harapan tinggi dalam melaksanakan proses belajarnya. Bukan mahasiswa yang hanya melaksanakan kegiatan perkualihannya tanpa sebuah *goal* yang tinggi. Meskipun demikian, mungkin terlalu dini untuk menilai bahwa kualitas lulusannya tidak bagus.

Sebab dibalik *input* yang bagus pula dibutuhkan kualitas proses. Bahkan dalam dunia perusahaan atau produksi. Bahan masukan – barang tidak layak pakai –kalau dikemas dengan proses dan bingkisan yang bagus akan menghasilkan *output* atau hasil yang sangat bermakna. Proses-proses inilah yang juga akan menentukan kualitas lulusan pada segmentasi selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teorinya, proses adalah sistem yang mengatur keseragaman kompetensi *input* , dosen dan pelayanan staff administrasi akademiknya. Keseragaman yang paling berkaitan dengan mahasiswa adalah kurikulum, silabi dan mekanisme tugas pelayanan mahasiswa dalam memperoleh akses informasinya. Buchari Alma menyebutkan, kekuatan proses berada pada aspek kurikulum dan dosen serta mahasiswanya sendiri. Sedangkan yang lainnya, sarana dan prasanan merupakan penunjang untuk menghasilkan kualitas lulusan yang kompetitif.

Selain proses pengembangan kurikulum, adalah proses belajar mengajar dosen. Dosen yang mempunyai kualitas akan berdampat pada mahasiswa paling tidak berkualitas sekalipun. Pasalnya, dosen yang berkualitas biasanya mampu memotivasi mahasiswanya untuk bekerja lebih dalam proses belajarnya ketimbang dosen yang standard kompetensinya biasa-biasa saja.

Aspek proses terakhir adalah sarana informasi maupun pelayanan akademik bagi mahasiswa. Total Quality manajemen (TQM) selalu didenegung-dengungkan untuk mengatasi problematika pelayanan informasi yang ada di perguruan tinggi. Sebagai mana yang disebutkan oleh Silviana Riva'i, bahwa TQM mutlak dilaksanakan agar bisa memberikan kepuasan (*setisfiction*).

Oleh karena kurikulum merupakan *core subject*, *blue print* perlu kiranya menganalisa subject-subject kurikulum yang sudah ada di dua fakultas di Lingkungan IAIN Sunan Ampel. Aspek-Aspek kurikulum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan rupanya masih kurikulum klasik berbasis kompetensi-kompetensi umum, dan kerangka metodologis yang juga umum. Semisal dibeberapa kurikulum jurusan tidak satupun ditemukan satu bentuk kualitas kurikulum yang memberikan penunjang menghilangkan *gap* antara fakultas sebagai lembaga pendidikan dan masyarakat. Sehingga, lulusannya menjadi bingung disaat harus berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kalau dalam proses input tidak berkualitas, proses program studinya masih generalis, kurikulumnya tidak ada relevansinya terhadap kehidupan nyata. Maka, bagaimanakah dengan lulusannya? Pasti jawabannya adalah lulusannya tidaklah berkualitas. Dalam teorinya, untuk meningkatkan kualitas lulusan, dibutuhkan prosedur pengenalan dari proses dengan memberikan informasi seutuhnya kepada mahasiswa yang bisa digeluti pasca menyelesaikan studinya.

Kompetensi lulusan yang dihadirkan pastilah bukan hanya pada poros profesi apa yang mestinya didapatkan. Melainkan pula, karakter diri untuk bisa mengaktulisasikan keilmuan yang sudah didapatinya beberapa tahun di bangku perkuliahan. Kompetensi lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi bagi seorang Mulya Lubis adalah memberikan sumbangsih signifikan di dalam kehidupan masyarakat muslim. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para alumni-alumni Lembaga Pendidikan Tinggi Islam, misalnya Komarudin Hidayat, Nur Syam, Abd. A'la. Mereka semua cerminan cendikian muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melaksanakan fungsinya untuk membentuk karekater pemikiran islam baru sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini.

Semestinya, selaras dengan yang dielu-elukan di dalam brosur atau *web* dua fakultas tersebut menyebutkan kompetensi lulusannya akan dibentuk sebagai pemikir, penulis, penerjemah, dan sejarawan muslim. Dibutuhkan kebijakan untuk bisa memperkenalkan secara langsung bagaimanakah menjadi (*how to be*) bukan bagaimana belajar (*how to learn*).

3. Bentuk-bentuk kebijakan

Untuk menggapainya makanya dibutuhkan bentuk kebijakan-kebijakan tersebut, yang dalam temuan kami di lapangan bisa di bentuk dalam satu konstruksi kausa *isue* tentang kualitas lulusan lembaga pendidikan Tinggi Islam. Lebih jelasnya marilah kita lihat tabel dibawah berikut :

No	Kualitas Input	Kualitas Proses	Kualitas Out Put	Bentuk kebijakan
1	Rendah	Pembentukan kurikulum, silabus dan Rancangan pembelajaran.	Kompetensi bukan berbentuk profesi	Relevansi kurikulum di dua fakultas. Kurikulum enterpreneurship.
2	Tidak sesuai standard minimum.	Intensifikasi proses penguasaan bahasa arab dan inggris	Memberikan nilai tambah untuk bisa bersaing dengan lulusan pondok pesantren melalui pengusaan metodologi penelitian dan bahasa inggris	Praktikum. Peneletian Lapangan (pengabdian masyarakat) Adab diwajibkan menghafalkan al-Qur'an dan Hadits. 4 juz Untuk Al-Qur'an dan 100 Untuk Al-Hadits

Tabel : 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di atas sudah digambarkan bahwa kualitas *input* yang rendah memaksa, lini kedua dalam peningkatan mutu (poses) harus dioptmalkan untuk bisa menghasilkan kualitas lulusan yang sesuai pada harapan-harapan awal yang diinginkan. Bentuk kebijakan-kebijakan untuk memang secara logis harus direlevasikan dengan permasalahannya. Inti permasalahan berada pada input mahasiswa yang tidak berkualitas. Fakultas sebagai penyedia layanan secara seksama harus membentuk kebijakan yang bisa mengikat mahasiswa yang sudah ada.

Dalam kaitan ini untuk mengalisa kebijakan tersebut, mungkin bisa di bingkai (frame) sebagai berikut :

Frame : Bentuk strategi kebijakan	
Framing Devices	**Reasoning Devices**
Visual Image : Terlihat dan diketahui dua fakultas ini merupakan fakultas yang mengalami penurunan minat baik input (yang mau menggunakan layanannya), maupun outputnya (pengguna jasa keagamaan).	Faktanya : Bahwa kebutuhan masyarakat tidak pada perihal keagamaan melainkan perekonomian (*pragmatisme*)
Action : Perbaikan proses-proses dan penambahan muatan kurikulum untuk bisa memberikan bekal nantinya di kehidapan nyata. Dari idealisme, ke realisme pengetahuan. Dari ilmu teoritik ke dalam prakteknya.	Faktanya : Semua jurusan mempunyai proses pembelajaran dan pengejaran berbasis pada penelitian. Praktikum-praktikum khusus untuk bisa diperkenalkan dalam dunia kerja nyata.
Policy : Relevansi Kurikulum.	Faktanya : Kurikulum kewirausahaan, kurkulum praktek (dalam bentuk peneltian di setiap perkuliahan), bukan hanya praktikum formal yang bisa dilaksanakan.
Peningkatan Kerja sama	Hal ini Cuma ditemukan di Adab, yang bekerjasama dengan lembaga penerbitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari content frame (diatas) dapat dijelaskan bahwa *visual image,* merupakan citera yang terlihat di dua fakultas tersebut. Di dua fakultas itu terlihat pernurunan input cukup signifikan dan diakui secara seksama oleh seluruh civitas akademika IAIN sunan ampel. Bahkan Pak Rektor (Nur Syam) menyebutkan bahwa hingga pada saat ini hanya fakultas tarbiyah secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hal ini, memang membuktikan kebutuhan pragmatisme keilmuan menjadi nyata – meski tidak semua lulusan fakultas tarbiyah bisa menjadi guru - minimal dalam benak mahasiswa nantinya ada satu bentuk profesi yang bisa digeluti dan diperjuangkan. Apalagi kesejahteraan guru selalu di naikkan oleh presiden SBY.

Pastinya, setelah melihat konstruksi input yang tidak bagus. Segala upaya dalam bentuk aksi. Action merupakan proses program implementatif yang dilaksanakan oleh dua fakultas untuk meningkatkan kualitas inputnya lebih awal. Terbukti, dua fakultas tersebut melaksanakan sekian banyak langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa program studi yang dipilihkanya juga mempunyai prospek masa depan yang menjanjikan. Aksi-Aksi ini merupakan kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan *visual image* yang ada diatas.

Tidak cukup pada satu bentuk ritual-ritual belaka. Terlihat disaat negara membentuk satu kebijakan progresif dari kebiasaan yang sudah ada. Semisal, pemberlakuan standarisasi kualitas sekolah. Ini dilaksanakan upaya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dan lebih meningkatkan kualtas sekolah. Sehingga, negarapun membentuk Lembaga Badan Akreditasi Nasional, Badan Standarisasi Pendidikan Nasional.

Begitu pula, relevansi kurikulum pun akan dilaksanakan karena pengembangan kurikulum hal yang wajib dalam dunia pendidikan. Tapi dipihak lain, harus dibuatkan kebijakan-kebijakan lain. Misalnya, yang ditemukan adalah relevansi praktikum. Memasukkan Kurikulum kewirausahaan karena sesuai dengan kebutuhan dalam membentuk dunia usaha. Dan meningkatkan kualitas lulusan agar bisa bersaing dengan lulusan lainnya, semisal hafalan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai corak pendidikan islam.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan sementara bahwa peningktan kualitas lulusan sudah dilaksanakan baik melalui proses (program) dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya. Diharapkan kebijakan ini bisa mengantarkan pada kepuasan mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran di dua fakultas yang kami teliti ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan yang ada maka dalam kesimpulan ini dapat dikategorikan menjadi tiga kesimpulan umum :

1. Di Fakultas Adab dapat disimpulkan bahwa prosedur kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang dianjurkan dalam kerangka teoritik, meski kami belum mendapatkan formulasi kongkrit. Pasalnya, dekan diwawancarai baru saja menjabat dua bulan. Sedangkan di Fakultas Ushuludin, dapat disimpulkan sudah *on the right side,* pasalnya, dalam prosedurnya sudah tertata dengan baik dan dilakukan melalui jenjang wantu yang sudah ditentukan bersama-sama.
2. Pada Aspek peningkatan mutu di Fakultas adab lebih mengena. Dengan pelbagai program-progam yang dicanangkan baik melalui program fakultatif ataupun pada aspek program yang sudah dicanangkan pada pusat (rektorat). Begitu halnya dengan yang ada di Fakultas Ushuludin, ada banyak program yang dilaksanakan pula dalam upaya pengembangan mutu, baik melalui program fakultas – dengan artian diinisiatifi oleh fakultas – atau melalui program kegiatan umum yang dicanangkan oleh pihak rektorat.
3. Adapun bentuk-bentuk kebijakan pengembangan mutu difakultas Adab adalah (a) hafalan al-Qur'an, (b) pendidikan enterprenership (c).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembngan pada intensifikasi bahasa arab agar bisa menjadi penerjemah buku-buku ilmiah ataupun fiksi. (d) peningkatan kerja sama dengan penerbit dan lembaga internasional lainnya (kedutaan). Bagi fakultas Ushuludin ada satu prioritas kebijakan yakni, perelevansian kurikulum antara aspek intelektualitas dan pengetahuan lapangan.

B. SARAN-SARAN

Berangkat dari kesimpulan di atas dan hasil penelitian. Ada tiga saran dari penulis. Adipun saran-saran itu sebagai berikut :

1. Optimalisasi perberlakuan sistem *total quality manajement* (TQM) secara utuh, yang memang terbukti memberikan *impact* yang sangat bagus terhadap peningkatan kualitas. Maksudnya, pemberlakuan tersebut dilaksanakan pada seluruh aspek pengelolaan pendidikan (holistic). Tidaklah parsial.
2. Otonomi Pendidikan dan pemberian keleluasan untuk pengembangan mahasiswa. Karena mahasiswa IAIN rupanya mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan culture yang berbeda pula. Sehingga bisa memberikan kompetence dan pendampingan yang lebih khusus dan signifikan tentang *soft skill.*
3. Inovasi kebijakan. Hal-hal yang sudah lakukan mungkin sudah dilaksanakan oleh pelbagai Universitas lainnya. Sehingga dibutuhkan ciri kebijakan yang khas oleh Fakultas Adab dan Ushuludin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Akdon. 2006. *Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategic Untuk Manajemen Pendidikan).* Bandung: ALFABETA.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Assegaf, Abd. Rahman. 2005. *Politik Pendidikan Nasional.* Jogjakarta : Kurnia Kalam.

Azizi, A. Qodry. 2000. *Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN. dalam Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, DEPAG RI.

Azra, Azzumardi. 2000. *Problem dan Prospek IAIN; Antologi pendidikan Tinggi Islam.* Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama.

Buku Panduan Penjaminan Mutu. Tt. Jakarta : Deriktorat Pendidikan Tinggi Nasional.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University.

Chan, Sam. M. dan Sam, Tuti T. 2008. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah; Analisis SWOT.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Crowther, Jhonathan. ed, 1995. *Oxford Advance Learners dictionary.* New York : Oxford University Press.

Darmawi, Herman. 1999. *Manajemen Risiko.* Jakarta: Bumi Aksara.

Erianto, Ery. 2007, *Analisis Framing konstruksi, Ideologi dan politik Media.* Jogjakarta: LkiS.

Gunawan, Ary H. 1995. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan,* Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Sutrisno. 1999. *Metodologi Research Jilid I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hedwing, Rinda. 2007. *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi : Monitoring dan Evaluasi Internal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hidayat, Komarudin. 1999. *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi.* Jakarta: Logos.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis.* Yogyakarta: ANDI.

Imron, Ali. 1995. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kasali, Rhenald. 2007. *Change.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Kisbiyanto. 2008. *Bunga Rampai Penelitian Manajemen Pendidikan.* Semarang: Rasail Media Group.

Kuncoro, Dr. E. A. SE, 2009. *Manajemen Corporate dan Strategi pemasaran Jasa Penidikan.* Bandung : Alfabeta.

Makkasau. 1983. *Metoda Analisis Sistem dan Operasional Administrasi.* Bandung: Sinar Baru.

Mardalis. 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin, Prof. Dr. H. MA. 2005. *Manajemen Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Malang.* Malang : UIN Malang.

Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyasa, E. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. 1994. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia; Ditinjau Dari Sudut Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Ndraha, Taiduhu Dr. 1988. *Manajemen Perguruan Tinggi.* Jakarta: Bina Aksara.

Palmer, Joy A. 2003. *50 Pemikir Islam dari Peaget sampai masa sekarang.* Yogyakarta: Jendela.

Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis, "Relevansi Pengembangan Ilmu-ilmu dengan Dunia Kerja di Era Globalisasi" dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998) 202

Rivai, Veithzal. Prof. Dr. H M B.A dan Murni, Sylvian. Dr. Hj. S.H. M.Si. 2009. *Education Manajemen: Analisis Teori dan Praktik.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sanusi, Ahmad. 1994. *Profesionalisasi Manajemen Pendidikan.* Bandung: IKIP.

Sirozi, Muhammad. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia.* INIS: Jakarta.

Steiner, George A. 1988. *Kebijakan dan Strategi Manajemen (terj).* Jakarta: Airlangga.

Sudijono, Anas. 2000. *Pengantar Statistik Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supandi dan Sanusi, Ahmad. 1988. *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan.* Jakarta : Dep. Dikti.

Suparlan. 2005. *Menjadi Guru Efekti.* Yogyakart: Hikayat.

Suryadi, Ace. 1994. *Analisis Keijakan Pendidikan; Suatu pengantar.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sutikno. *NIZAMIA*. Vol. 3, No. 6, Juli-Desember 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyanto, Bedjo. 2007. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah.* Jakarta: Sagung Seto.

Tilaar, HAR. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan.* Jakarta : PT Rineka Cipta.

_____ dan Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____ 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tunggal, Amin Widjaja. 1993. *Manajemen Mutu Terpadu; Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Umaedi, Drs. M.Ed. 1999. *Direktur Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.* Dirdepdiknas.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. *Manajemen Strategik; Pengantar Proses Berpikir Strategik.* Jakarta: Binarupa Aksara.

wikipidia.ensklopidiabebas.org

www.kopertis.or.id.E-mail:kopwil4@bdg.centrin.net.id

www.depag.ri.org

www.skripd.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id